

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA BINJAI 2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BINJAI**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA BINJAI 2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BINJAI**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA BINJAI 2021

ISBN : 978-623-6930-18-2
No. Publikasi : 12760.2121
Katalog : 4102002.1276
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman : xiv + 73 halaman

Naskah :
Badan Pusat Statistik Kota Binjai

Gambar Kulit :
Badan Pusat Statistik Kota Binjai

Diterbitkan Oleh :
Badan Pusat Statistik Kota Binjai

Dicetak Oleh :
CV. Rilis Grafika

“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.”

TIM PENYUSUN

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KOTA BINJAI
2021

Penanggung Jawab Umum :

Ir. Ida Suswati, M.Si

Penanggung Jawab Teknis :

Suharwanto, SE, M.Si

Editor :

Suharwanto, SE, M.Si

Penulis

Gambar Kulit

Tata Letak

Infografis

Deby Ayuningtias, A.Md

Kata Pengantar

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kota Binjai (Metode Baru) diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Binjai. Publikasi ini disajikan dalam bentuk analisis singkat dan padat yang memuat hasil atau capaian pembangunan manusia di Kota Binjai yang mencakup aspek pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pada tahun 2014, Badan Pusat Statistik secara resmi menghitung IPM dengan metode baru. Untuk menjaga kesinambungan series angka IPM metode baru, maka dilakukan backcasting IPM tahun 2010 sampai dengan 2013. Publikasi ini menampilkan data runtun waktu mengenai perkembangan pembangunan manusia di Kota Binjai.

Semoga publikasi capaian pembangunan manusia Kota Binjai yang berjudul “Indeks Pembangunan Manusia Kota Binjai 2021” ini bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan, termasuk masyarakat pengguna sebagai bahan rujukan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan publikasi ini.

Binjai, Desember 2021

**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BINJAI**
Kepala,



Ir. Ida Suswati, M.Si

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Lampiran	xiii
Bab 1 Gagasan Pembangunan Manusia	1
1.1 Ide Dasar.....	3
1.2 Definisi Pembangunan Manusia	4
1.3 Mengukur Pembangunan Manusia.....	4
1.4 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
Bab 2 Inovasi dalam Pengukuran Pembangunan Manusia	9
2.1 Perjalanan Penghitungan IPM	11
2.2 Perubahan Metodologi IPM	13
2.3 Komponen IPM	18
2.4 Penyusunan IPM	22
Bab 3 Status Pembangunan Manusia	25
3.1 Status Pembangunan Manusia Kota Binjai	27
3.2 Posisi Kota Binjai	28
3.3 Status Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota	34
Bab 4 Kemajuan Pembangunan Manusia	37
4.1 Tren Terbaru Pembangunan Manusia melalui Lensa IPM	39
4.2 Hidup Lebih Lama, Kesehatan yang Lebih Baik	40
4.3 Pendidikan Memperluas Peluang	42

4.4 Kenaikan Standar Hidup	46
Bab 5 Disparitas Pembangunan Manusia di Sumatera Utara	49
5.1 Gambaran Umum Wilayah Sumatera Utara	51
5.2 Kesenjangan Pembangunan Manusia Antara Kawasan Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Pantai Timur	52
5.3 Kesenjangan Pembangunan Manusia di Sumatera Utara.....	54
5.4 Kesenjangan Pembangunan Manusia Antara Kabupaten dan Kota ...	60
LAMPIRAN	65

<https://binjaikota.bps.go.id>

Daftar Gambar

Gambar 2.1	Perjalanan Metodologi Penghitungan IPM di UNDP	12
Gambar 3.1	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara, 2021.....	29
Gambar 3.2	Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara, 2021	30
Gambar 3.3	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara, 2021	31
Gambar 3.4	Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara, 2021	32
Gambar 3.5	Pengeluaran per Kapita (d disesuaikan) Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara, 2021	34
Gambar 3.6	IPM Sumatera Utara menurut Kabupaten Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2021	35
Gambar 3.7	Persentase Status Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2021	36
Gambar 4.1	Perkembangan IPM Kota Binjai, 2017-2021	39
Gambar 4.2	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Binjai, 2017-2021.....	41
Gambar 4.3	Angka Harapan Hidup Saat Lahir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2021	42
Gambar 4.4	Perkembangan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kota Binjai, 2017-2021	43
Gambar 4.5	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2021.....	44
Gambar 4.6	Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2021	45

Gambar 4.7	Perkembangan Pengeluaran per Kapita per Tahun Kota Binjai, 2017-2021 (juta rupiah)	47
Gambar 4.8	Pengeluaran per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2021 (ribu rupiah)	48
Gambar 5.1	IPM Tertinggi dan Terendah menurut Kawasan di Provinsi Sumatera Utara, 2021	53
Gambar 5.2	Perkembangan Selisih IPM Kabupaten/ Kota Tertinggi dengan Terendah di Provinsi Sumatera Utara, 2017-2021	55
Gambar 5.3	Perkembangan Selisih AHH Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Provinsi Sumatera Utara, 2017-2021	56
Gambar 5.4	Perkembangan Selisih HLS Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Provinsi Sumatera Utara, 2017-2021	57
Gambar 5.5	Perkembangan Selisih RLS Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Provinsi Sumatera Utara, 2017-2021	58
Gambar 5.6	Perkembangan Selisih Pengeluaran per Kapita Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Sumatera Utara, 2017-2021	59
Gambar 5.7	IPM Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah, 2021	61
Gambar 5.8	Perbandingan IPM kabupaten/Kota di Sumatera Utara menurut Status IPM, 2021	62

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Simulasi Rata-rata Aritmatik dan Rata-rata Geometrik	14
Tabel 2.2	Perbedaan Indikator Metode Lama dan Metode Baru UNDP	15
Tabel 2.3	Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP)	21
Tabel 2.4	Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM	22
Tabel 3.1	Klasifikasi Status Pembangunan Manusia	27
Tabel 4.1	Kabupaten/Kota dengan Perkembangan Tercepat dalam Pembangunan Manusia, 2017-2021	40
Tabel 5.1	Penggolongan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara menurut Wilayah	51
Tabel 5.2	Persentase Status IPM Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Menurut Kawasan, 2021	54

Daftar Lampiran

Lampiran 1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2021	67
Lampiran 2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2020	68
Lampiran 3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2019	69
Lampiran 4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2018	70
Lampiran 5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2017	71
Lampiran 6	Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2017-2021	72
Lampiran 8	IPM, Peringkat dan Pertumbuhan IPM menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2021	73

BAB I Gagasan Pembangunan Manusia



3 DIMENSI IPM

Dan Indikatornya

Umur Panjang dan Hidup Sehat

Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)

Pengetahuan

- Harapan Lama Sekolah (HLS)
- Rata-rata Lama Sekolah (RLS)



Standar Hidup Layak

PNB per Kapita



1.1 Ide Dasar

“Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana, tetapi seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang”. (Human Development Report 1990).

Kalimat pembuka pada Human Development Report (HDR) edisi pertama yang dipublikasikan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 secara jelas menekankan arti pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia. Pembangunan pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dan berkesinambungan. Tujuan akhir pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia, yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, bukan sebagai alat pembangunan, karena manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya.

Pembangunan manusia berarti pertumbuhan yang positif dan perubahan dalam tingkat kesejahteraan. Kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan peningkatan kesejahteraan manusia, akan membuat suatu daerah tertinggal dari daerah lain. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan manusia akan memberikan manfaat dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

Konsep pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi. Menurut *United Nation Development Program* (UNDP), pembangunan manusia salah satunya berupa suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*“aprocess of enlarging people’s choices”*). Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya.

Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dari seberapa besar permasalahan mendasar di masyarakat yang dapat teratasi. Permasalahan-

permasalahan tersebut antara lain meliputi kemiskinan dan pengangguran serta ketiadaan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan. Keberhasilan pembangunan manusia juga harus dapat diukur. Berbagai ukuran pembangunan manusia telah dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat berlaku di semua wilayah atau negara.

1.2 Definisi Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan masyarakat. Pada prinsipnya, pilihan manusia sangat banyak jumlahnya dan berubah setiap saat. Tiga pilihan yang paling mendasar, yaitu untuk berumur panjang dan hidup sehat, memperoleh pendidikan dan memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar hidup secara layak. Selain tiga pilihan dasar tersebut, juga terdapat pilihan lainnya atau pilihan tambahan. Pilihan tambahan, mulai dari politik, kebebasan ekonomi dan sosial sehingga memiliki peluang untuk menjadi kreatif dan produktif, dan menikmati harga diri pribadi dan jaminan hak asasi manusia.

Pembangunan manusia memiliki dua sisi. Pertama, pembentukan kapabilitas manusia seperti peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kemampuan. Kedua, penggunaan kapabilitas yang mereka miliki, seperti untuk menikmati waktu luang, tujuan produktif atau aktif dalam kegiatan budaya, sosial, dan urusan politik. Apabila skala pembangunan manusia tidak seimbang, kemungkinan akan terjadi ketidakstabilan.

Berdasarkan konsep pembangunan manusia, pendapatan merupakan salah satu pilihan yang harus dimiliki. Akan tetapi, pembangunan bukan sekadar perluasan pendapatan dan kesejahteraan. Pembangunan manusia harus memfokuskan pada manusia (*HDR 1990 halaman 10*).

1.3 Mengukur Pembangunan Manusia

Keberhasilan pembangunan diukur dengan beberapa parameter, yang populer pembangunan manusia. Dalam sistem pengukuran dan monitoring pembangunan manusia, idealnya mencakup variabel inti untuk mendapatkan gambaran yang

komprehensif. Variabel tersebut menerangkan sebagian besar data/indikator yang menjadi perhatian penting dalam pengukuran pembangunan manusia.

Pengukuran pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990. UNDP memperkenalkan sebuah gagasan baru dalam pengukuran pembangunan manusia yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks (HDI)*. Alat ukur ini diluncurkan oleh *Mahbub ul Haq* dalam bukunya yang berjudul *Reflections on Human Development* (1995), dan telah disepakati dunia melalui *United Nation Development Programe* (UNDP).

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup:

1. umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*);
2. pengetahuan (*knowledge*); dan
3. standar hidup layak (*decent standard of living*).

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Pada laporan pertamanya, UNDP mengukur dimensi kesehatan dengan menggunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan angka melek huruf. Adapun untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

1.4 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Manfaat penting IPM antara lain sebagai berikut:

- IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

- Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Dalam meningkatkan kesejahteraan manusia, yang dicerminkan dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat beberapa strategi yang dapat dikembangkan. Strategi tersebut yaitu peningkatan pendapatan perkapita yang sekaligus penurunan angka kemiskinan dan pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (melalui percepatan investasi). Strategi bidang pendidikan, yang dapat dikembangkan yaitu peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang didukung oleh pemantapan pelaksanaan pendidikan formal, mulai dari pendidikan anak usia dini sampai wajib belajar 12 tahun. Strategi lainnya yaitu pengembangan lembaga jaminan sosial, peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, peningkatan kesetaraan gender, perlindungan anak, penurunan kesenjangan antar daerah serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran umum dari pencapaian pembangunan dan penentuan prioritas-prioritasnya yang dicapai oleh suatu wilayah. Pencapaian pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan yang berwawasan manusia yaitu pembangunan yang bertujuan untuk memperluas peluang. Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan Kota Binjai yang salah satunya adalah kesejahteraan masyarakat yang komponennya meliputi tingkat pendidikan, pendapatan perkapita, tenaga kerja (*employment*), kesehatan dan lain-lain.

1.5 Sistematika Penulisan

Publikasi ini secara umum menyajikan data dan analisis Indeks Pembangunan Manusia Kota Binjai metode baru selama periode 2017-2021, baik Kota Binjai maupun menurut kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Untuk melihat perkembangan IPM secara lebih utuh, menyajikan kondisi sosial ekonomi, perkembangan IPM dan komponennya, kemajuan pembangunan manusia dan disparitas pembangunan manusia antar wilayah Kota Binjai dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Publikasi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab 1 menyajikan ide dasar penulisan yang menguraikan manfaat peningkatan kualitas modal manusia dalam pembangunan daerah.

Bab 2, yaitu bab yang menguraikan tentang perubahan metodologi IPM metode baru, inovasi dalam pengukuran pembangunan manusia.

Bab 3 akan menyajikan status pembangunan manusia Kota Binjai.

Bab 4 akan menyajikan Kemajuan pembangunan Kota Binjai beserta analisis dan pembahasan secara deskriptif.

Bab 5 yang menguraikan disparitas pembangunan manusia Kota Binjai dengan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

<https://binjaikota.bps.go.id>

BAB II

INOVASI DALAM PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA

METODE LAMA

METODE BARU

ANGKA HARAPAN HIDUP
SAAT LAHIR (AHH)



ANGKA HARAPAN
HIDUP SAAT LAHIR
(AHH)

ANGKA MELEK HURUF
(AMH)
RATA-RATA LAMA
SEKOLAH (RLS) 15+



HARAPAN LAMA SEKOLAH
(HLS)
RATA-RATA LAMA SEKOLAH
(RLS)

PENGELUARAN PER
KAPITA :
27 KOMODITAS PPP



PENGELUARAN PER
KAPITA :
96 KOMODITAS PPP

RATA-RATA ARITMATIK



RATA-RATA GEOMETRIK

REDUKSI SHORTFALL
(RSF)



PERTUMBUHAN
ARITMATIK

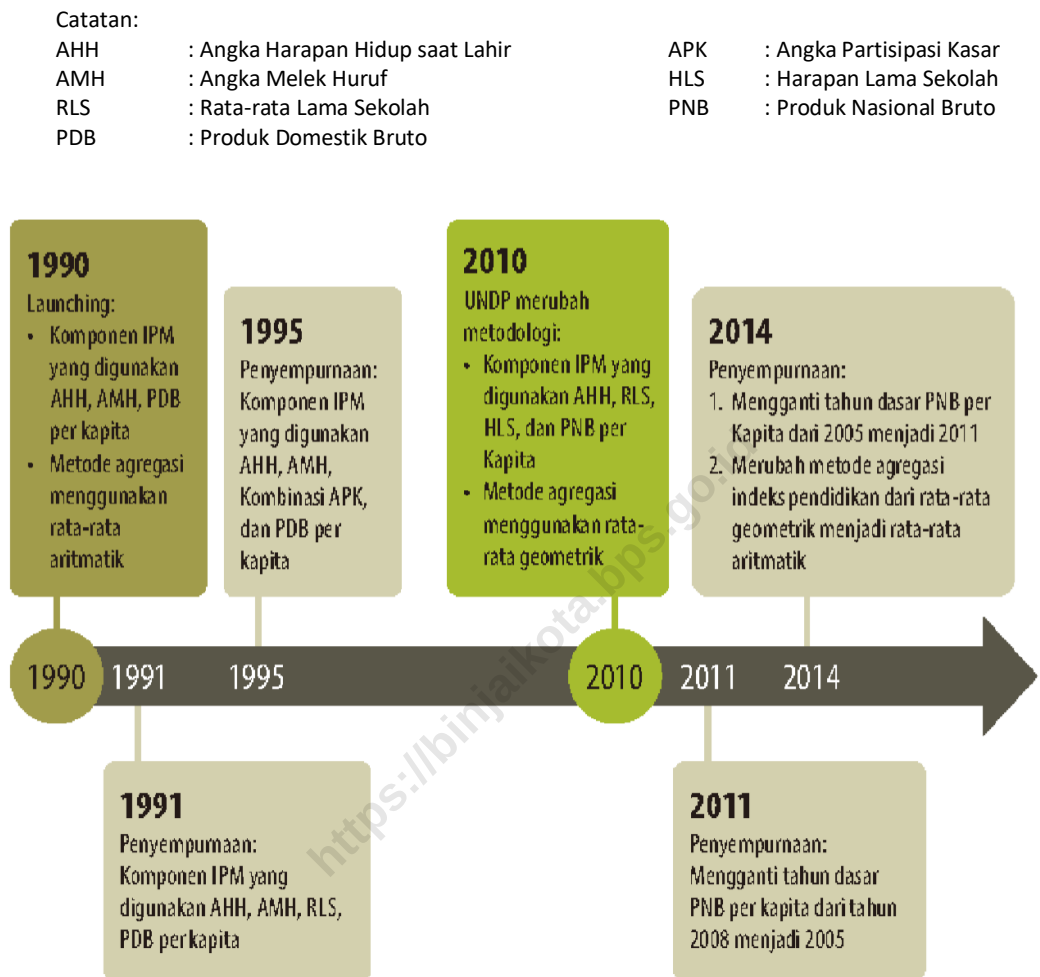
2.1 Perjalanan Penghitungan IPM

Sejak pertama kali diperkenalkan oleh UNDP, IPM terus mendapat banyak sorotan. Banyak dukungan yang mengalir, tetapi tidak sedikit kritikan terhadap indikator ini. Sebagian pihak berpendapat bahwa indikator yang tercakup di dalam IPM kurang mewakili pembangunan. Para pakar terus bekerja untuk mendalami lebih jauh tentang pembangunan manusia. Mereka terus melakukan kajian untuk menyempurnakan penghitungan IPM. Hal itu terutama dilakukan pada indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM. Tercatat bahwa UNDP melakukan dua kali penyempurnaan pada tahun 1991 dan 1995 dan perubahan di tahun 2010.

Awalnya, UNDP memperkenalkan suatu indeks komposit yang mampu mengukur pembangunan manusia. Ketika diperkenalkan pada tahun 1990, mereka menyebutnya sebagai Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) yang kemudian secara rutin dipublikasikan setiap tahun dalam Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Report*). Kala itu, IPM dihitung melalui pendekatan dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diproksi dengan angka harapan hidup saat lahir, dimensi pengetahuan yang diproksi dengan angka melek huruf dewasa, serta dimensi standar hidup layak yang diproksi dengan PDB per kapita. Untuk menghitung ketiga dimensi menjadi sebuah indeks komposit, digunakan rata-rata aritmatik.

Setahun berselang, UNDP melakukan penyempurnaan penghitungan IPM dengan menambahkan variabel rata-rata lama sekolah ke dalam dimensi pengetahuan. Akhirnya, terdapat dua indikator dalam dimensi pengetahuan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Karena terdapat dua indikator dalam dimensi pengetahuan, UNDP memberi bobot untuk keduanya. Indikator angka melek huruf diberi bobot dua per tiga, sementara indikator rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga. Hingga tahun 1994, keempat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM masih cukup relevan. Namun akhirnya, pada tahun 1995 UNDP kembali melakukan penyempurnaan metode penghitungan IPM. Kali ini, UNDP mengganti variabel rata-rata lama sekolah menjadi gabungan angka partisipasi kasar. Pembobotan tetap dilakukan dengan metode yang sama seperti sebelumnya.

Gambar 2.1 Perjalanan Metodologi Penghitungan IPM di UNDP



Pada tahun 2010, UNDP merubah metodologi penghitungan IPM. Kali ini perubahan drastis terjadi pada penghitungan IPM. UNDP menyebut perubahan yang dilakukan pada penghitungan IPM sebagai metode baru. Beberapa indikator diganti menjadi lebih relevan. Indikator Angka Partisipasi Kasar Gabungan (*Combine Gross Enrollment Ratio*) diganti dengan indikator Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*). Indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain itu, cara penghitungan juga ikut berubah. Metode rata-rata aritmatik diganti menjadi rata-rata geometrik untuk menghitung indeks komposit.

Perubahan yang dilakukan UNDP tidak hanya sebatas itu. Setahun kemudian, UNDP menyempurnakan penghitungan metode baru. UNDP merubah tahun dasar penghitungan PNB per kapita dari 2008 menjadi 2015. Tiga tahun berselang, UNDP melakukan penyempurnaan kembali penghitungan metode baru. Metode agregasi indeks pendidikan diubah dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik dan tahun dasar PNB per kapita. Serangkaian perubahan yang dilakukan UNDP bertujuan untuk membuat suatu indeks komposit yang cukup relevan dalam mengukur pembangunan manusia.

2.2 Perubahan Metodologi IPM

Pada dasarnya, perubahan metodologi penghitungan IPM didasarkan pada alasan yang cukup rasional. Suatu indeks komposit harus mampu mengukur apa yang diukur. Dengan pemilihan metode dan variabel yang tepat, indeks yang dihasilkan akan cukup relevan. Alasan utama yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM diperkuat oleh dua hal mendasar. **Pertama**, beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM.

Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Sebelum penghitungan metode baru digunakan, AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar wilayah dengan baik. Dalam konsep pembentukan indeks komposit, variabel yang tidak sensitif membedakan akan menyebabkan indikator komposit menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, indikator AMH dianggap sudah tidak relevan sebagai komponen dalam penghitungan IPM.

Selanjutnya adalah indikator PDB per kapita. Indikator ini pada dasarnya merupakan proksi terhadap pendapatan masyarakat. Namun disadari bahwa PDB diciptakan dari seluruh faktor produksi dan apabila ada investasi dari asing turut diperhitungkan. Padahal, tidak seluruh pendapatan faktor produksi dinikmati penduduk lokal. Oleh karena itu, PDB per kapita kurang dapat menggambarkan pendapatan masyarakat atau bahkan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah.

Kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain. Pada dasarnya, konsep yang diusung dalam pembangunan manusia adalah pemerataan pembangunan dan sangat anti terhadap ketimpangan pembangunan. Rata-rata aritmatik memungkinkan adanya transfer capaian dari dimensi dengan capaian tinggi ke dimensi dengan capaian rendah. Perumpamaan sederhana untuk dapat melihat kelemahan rata-rata aritmatik misalnya dengan menghitung secara sederhana nilai ketiga dimensi pembangunan manusia.

Tabel 2.1 Simulasi Rata-rata Aritmatik dan Rata-rata Geometrik

Kesehatan	Pendidikan	Standar Hidup Layak	Rata-rata Aritmatik	Rata-rata Geometrik
3	3	3	3,00	3,00
2	3	4	3,00	2,88
1	3	5	3,00	2,47

Misal, capaian dimensi umur panjang dan sehat, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup masing-masing adalah 3, 3, dan 3. Dengan rata-rata aritmatik dapat diperoleh dengan mudah bahwa rata-rata ketiga dimensi adalah $(3 + 3 + 3) / 3 = 3$. Pada contoh kasus lain, misalkan capaian ketiga dimensi berturut-turut adalah 2, 3, dan 4. Rata-rata ketiga dimensi juga masih 3, yaitu $(2 + 3 + 4) / 3 = 3$. Padahal secara nyata terlihat bahwa ada ketimpangan capaian antar dimensi pembangunan manusia.

Pada kasus yang lebih ekstrim, rata-rata aritmatik mampu menutupi ketimpangan pembangunan manusia yang terjadi di suatu wilayah. Misal, capaian ketiga dimensi secara berturut-turut menjadi 1, 3, dan 5. Dalam kondisi ketimpangan yang ekstrim ini, rata-rata pembangunan manusia tetap 3. Kondisi ini sama dengan capaian suatu wilayah pada contoh kasus pertama. Rata-rata aritmatik menyebabkan seolah-olah tidak terjadi ketimpangan karena hasil dapat ditutupi oleh dimensi yang lebih tinggi capaiannya. Kelemahan rata-rata aritmatik ini menjadi salah satu alasan mendasar untuk memperbarui metode penghitungan IPM.

UNDP memperkenalkan penghitungan IPM metode baru dengan beberapa perbedaan mendasar dibanding metode lama. Setidaknya, terdapat dua hal mendasar

dalam perubahan metode baru ini. Kedua hal mendasar terdapat pada aspek indikator dan cara penghitungan indeks.

Pada metode baru, UNDP memperkenalkan indikator baru pada dimensi pengetahuan yaitu Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*). Indikator ini digunakan untuk menggantikan indikator AMH yang memang saat ini sudah tidak relevan karena capaian di banyak negara sudah sangat tinggi. UNDP juga menggunakan indikator PNB per kapita untuk menggantikan indikator PDB per kapita.

Tabel 2.2 Perbedaan Indikator Metode Lama dan Metode Baru UNDP

Dimensi	Metode Lama	Metode Baru
Umur Panjang dan Hidup Sehat	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	• Angka Melek Huruf (AMH) • Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	• Harapan Lama Sekolah (HLS) • Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	PDB per Kapita	PNB per Kapita

Selain indikator baru, UNDP melakukan perubahan cara penghitungan indeks. Pada metode lama, agregasi indeks komposit menggunakan rata-rata aritmatik. Berbeda pada metode baru menggunakan rata-rata geometrik (*geometric mean*). Cara penghitungan indeks yang terbilang baru ini cenderung sensitif terhadap ketimpangan. Tidak seperti rata-rata aritmatik yang dapat menutupi ketimpangan yang terjadi antardimensi, rata-rata geometrik menuntut keseimbangan ketiga dimensi IPM agar capaian IPM menjadi optimal. Metode agregasi indeks komposit yang digunakan pada metode baru merupakan penyempurnaan metode lama.

PERBANDINGAN IPM METODE LAMA & METODE BARU

METODE LAMA

METODE BARU

Angka Harapan Hidup
saat Lahir (AHH)



Angka Harapan Hidup
saat Lahir (AHH)

Angka Melek Huruf (AMH)
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 15+



Harapan Lama Sekolah (HLS)
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 25+

Pengeluaran per Kapita:
27 Komoditas PPP



Pengeluaran per Kapita:
96 Komoditas PPP

Rata-rata Aritmatik



Rata-rata Geometrik

Reduksi *Shortfall* (RSF)



Pertumbuhan Aritmatik

Perubahan mendasar yang terjadi pada penghitungan IPM tentunya membawa dampak. Secara langsung, ada dua dampak yang terjadi akibat perubahan metode penghitungan IPM. **Pertama**, perubahan level IPM. Secara umum, level IPM metode baru lebih rendah dibanding IPM metode lama. Hal ini terjadi karena perubahan indikator dan perubahan cara penghitungan. Penggantian indikator Angka Melek Huruf (AMH) menjadi Harapan Lama Sekolah (HLS) membuat angka IPM lebih rendah karena secara umum AMH sudah di atas 90 persen sementara HLS belum cukup optimal. Selain itu, perubahan rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik juga turut andil dalam penurunan level IPM metode baru. Ketimpangan yang terjadi antar dimensi akan mengakibatkan capaian IPM menjadi rendah.

Kedua, terjadi perubahan peringkat IPM. Perubahan indikator dan cara penghitungan membawa dampak pada perubahan peringkat IPM. Perubahan indikator berdampak pada perubahan indeks dimensi. Sementara perubahan cara penghitungan berdampak signifikan terhadap agregasi indeks. Namun, perlu dicatat bahwa peringkat IPM antara kedua metode tidak dapat dibandingkan karena kedua metode tidak sama.

Pada tahun 2014, Indonesia secara resmi melakukan penghitungan IPM dengan metode baru. Untuk mengaplikasikan metode baru, sumber data yang tersedia di Indonesia, yaitu:

- Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010/SP2010, Proyeksi Penduduk)
- Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional/SUSENAS)
- PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS.

Indonesia melakukan beberapa penyesuaian terhadap metode baru. Penyesuaian ini dilakukan pada indikator PNB per kapita karena masalah ketersediaan data. Dari empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM metode baru, tiga diantaranya sama persis dengan UNDP. Khusus untuk PNB per kapita, indikator ini diproksi dengan pengeluaran per kapita.

2.3 Komponen IPM

a. Angka Harapan Hidup saat Lahir

Sebenarnya cukup banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dimensi umur panjang dan sehat, namun dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara umum, maka UNDP memilih indikator Angka Harapan Hidup waktu lahir (*life expectancy at birth*) sebagai salah satu komponen untuk penghitungan IPM. Angka harapan hidup saat lahir (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (*indirect estimation*).

Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program *Mortpack* digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode *Trussel* dengan model *West*, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004). Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun.

Indikator angka harapan hidup saat lahir tidak mengalami perubahan pada metode baru. Akan tetapi, sumber data yang digunakan dalam penghitungan indikator ini telah diperbarui dengan menggunakan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010). Indikator ini menjadi indikator penting untuk melihat derajat kesehatan suatu masyarakat. Indikator ini tetap dipertahankan keberadaannya karena selain relevansinya, juga ketersediaan data hingga tingkat kabupaten/kota cukup memadai.

b. Tingkat Pendidikan

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan harapan lama sekolah (*expected years*

of schooling). Indikator harapan lama sekolah merupakan indikator baru menggantikan angka melek huruf. Seperti pada penjelasan sebelumnya, indikator angka melek huruf sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

b.1. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).

b.2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Indikator rata-rata lama sekolah tetap dipertahankan karena menggambarkan stok yang terjadi pada dunia pendidikan. Namun, cakupan penghitungan yang digunakan pada metode baru telah diganti. Pada metode lama, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Sementara pada metode baru, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas sesuai dengan rekomendasi UNDP. Selain untuk keterbandingan dengan internasional, alasan penting lain yaitu bahwa pada umumnya penduduk berusia 25 ke atas tidak bersekolah lagi. Walaupun sebagian kecil ada yang masih bersekolah, jumlahnya tidak signifikan. Penduduk usia 25 tahun ke atas merupakan stok pendidikan yang dimiliki oleh suatu wilayah.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-

rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

c. Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan. Indikator PNB per kapita lebih menggambarkan kesejahteraan masyarakat dibanding pengeluaran per kapita, namun data ini tidak tersedia hingga tingkat kabupaten/kota. Saat ini BPS masih menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purcashing power parity*) berbasis formula Rao.

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{\frac{1}{m}} \quad (1)$$

Ada perubahan pada penghitungan paritas daya beli (*purcashing power parity*) yang digunakan. Pada metode lama, terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam penghitungan paritas daya beli. Sementara pada metode baru terdapat 96 komoditas yang digunakan. Hal ini dilakukan karena selama 1990 hingga 2014 telah terjadi banyak perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga komoditas penghitungan paritas daya beli juga harus diperbarui.

Penghitungan paritas daya beli dilakukan berdasarkan 96 komoditas kebutuhan pokok seperti terlihat dalam Tabel 2.3. Batas maksimum dan minimum penghitungan pengeluaran per kapita yang digunakan dalam penghitungan IPM seperti terlihat dalam Tabel 2.4. Batas maksimum pengeluaran per kapita adalah sebesar Rp 26.572.352 sementara batas minimumnya adalah Rp 1.007.436.

Tabel 2.3 Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP)

Beras	Pisang lainnya	Rokok kretek tanpa filter
Tepung terigu	Pepaya	Rokok putih
Ketela pohon/singkong	Minyak kelapa	Rumah sendiri/bebas sewa
Kentang	Minyak goreng lainnya	Rumah kontrak
Tongkol/tuna/cakalang	Kelapa	Rumah sewa
Kembung	Gula pasir	Rumah dinas
Bandeng	Teh	Listrik
Mujair	Kopi	Air PAM
Mas	Garam	LPG
Lele	Kecap	Minyak tanah
Ikan segar lainnya	Penyedap masakan/vetsin	Lainnya(batu baterai,aki,korek,obat
Daging sapi	Mie instan	Perlengkapan mandi
Daging ayam ras	Roti manis/roti lainnya	Barang kecantikan
Daging ayam kampung	Kue kering	Perawatan kulit,muka,kuku,rambut
Telur ayam ras	Kue basah	Sabun cuci
Susu kental manis	Makanan gorengan	Biaya RS Pemerintah
Susu bubuk	Gado-gado/ketoprak	Biaya RS Swasta
Susu bubuk bayi	Nasi campur/rames	Puskesmas/pustu
Bayam	Nasi goreng	Praktek dokter/poliklinik
Kangkung	Nasi putih	SPP
Kacang panjang	Lontong/ketupat sayur	Bensin
Bawang merah	Soto/gule/sop/rawon/cinca ng	Transportasi/pengangkutan umum
Bawang putih	Sate/tongseng	Pos dan Telekomunikasi
Cabe merah	Mie bakso/mie rebus/mie goreng	Pakaian jadi laki-laki dewasa
Cabe rawit	Makanan ringan anak	Pakaian jadi perempuan dewasa
Tahu	Ikang (goreng/bakar dll)	Pakaian jadi anak-anak
Tempe	Ayam/daging (goreng dll)	Alas kaki
Jeruk	Makanan jadi lainnya	Minyak Pelumas
Mangga	Air kemasan galon	Meubelair
Salak	Minuman jadi lainnya	Peralatan Rumah Tangga
Pisang ambon	Es lainnya	Perlengkapan perabot rumah tangga
Pisang raja	Rokok kretek filter	Alat-alat Dapur/Makan

2.4 Penyusunan IPM

Sebelum menghitung IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksinya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:

$$I_{AHH} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}} \quad (2)$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}} \quad (3)$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}} \quad (4)$$

$$I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} - I_{minRLS}}{2} \quad (5)$$

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{max}) - \ln(pengeluaran_{min})} \quad (6)$$

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel L2.

Tabel 2.4 Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM

Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1.007.436	26.572.352

Keterangan:

- * Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara Papua
- ** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \quad (7)$$

Kecepatan perubahan IPM juga menjadi salah satu fokus dalam pembangunan manusia. Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan per tahun. Pada metode lama, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan *reduksi shortfall*. Pada metode baru, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan pertumbuhan aritmatik.

Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara perubahan capaian terkini dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM, maka semakin cepat pula peningkatan IPM. Indikator pertumbuhan IPM ini dapat digunakan sebagai kinerja pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} \times 100\% \quad (7)$$

Keterangan:

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

$IPM_{(t-1)}$: IPM suatu wilayah pada tahun $(t-1)$

BAB III



STATUS PEMBANGUNAN MANUSIA



Indeks Pembangunan Manusia
Kota Binjai Tahun 2021



SANGAT TINGGI

IPM $\geq$ 80

TINGGI

70 $\leq$ IPM < 80



IPM
SUMATERA UTARA



IPM
MEDAN



SEDANG

60 $\leq$ IPM < 70

RENDAH

IPM < 60



3.1 Status Pembangunan Manusia Kota Binjai

Sebagai indikator komposit, jika IPM disajikan tersendiri maka hanya dapat menunjukkan status pembangunan manusia suatu wilayah. Manfaat IPM dapat diperluas jika dilakukan perbandingan antar waktu dan antar wilayah. Kemajuan atau pencapaian IPM antar waktu di suatu wilayah seperti kabupaten atau provinsi serta perbandingannya dengan pencapaian di wilayah lain juga dapat dianalisis.

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan kedalam empat kelompok. Pengelompokkan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

Tabel 3.1 Klasifikasi Status Pembangunan Manusia

Nilai IPM	Status Pembangunan Manusia
< 60	Rendah
$60 \leq \text{IPM} < 70$	Sedang
$70 \leq \text{IPM} < 80$	Tinggi
≥ 80	Sangat Tinggi

Indeks Pembangunan Manusia Kota Binjai mencapai 76,01 pada tahun 2021. Dengan capaian IPM itu, Kota Binjai berada pada posisi status pembangunan manusia kategori “tinggi”. Tidak hanya itu, capaian ini juga sekaligus mengantarkan Kota Binjai pada posisi tiga dari 33 kabupaten/kota dalam pencapaian pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara.

Capaian IPM merupakan agregasi dari tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator angka harapan hidup saat lahir. Rata-rata bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup di Kota Binjai pada tahun 2021 mencapai usia 72,45 tahun.

Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Secara rata-rata, penduduk 25 tahun ke atas di Kota Binjai telah menempuh pendidikan hingga 10,94 tahun atau setara dengan mencapai SMA kelas 11.

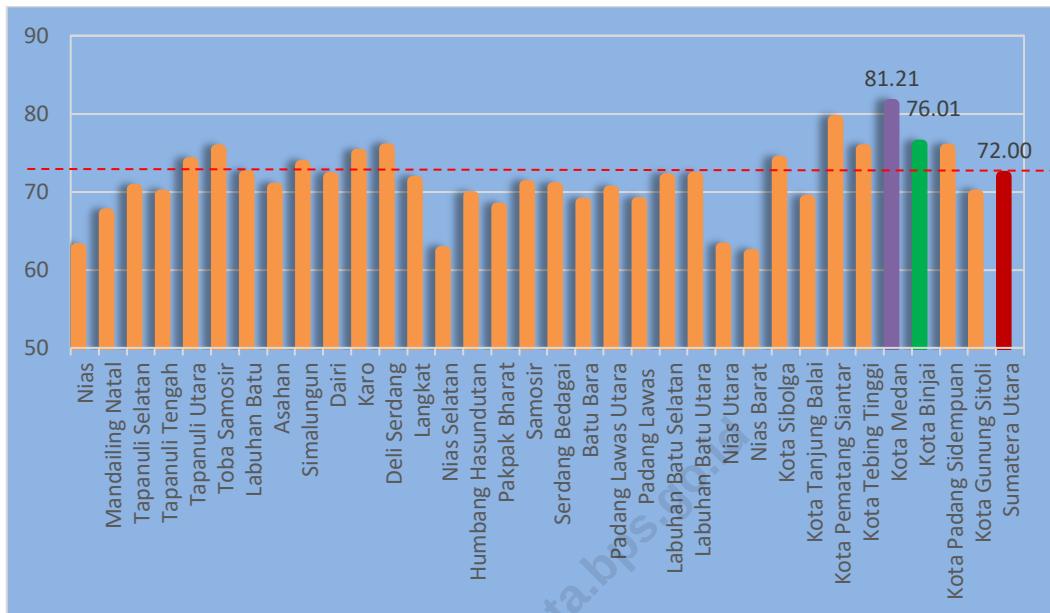
Sementara anak berusia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan mampu bersekolah hingga 13,63 tahun atau mencapai Diploma II.

Tidak kalah penting yaitu dimensi standar hidup layak yang diukur melalui indikator rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Daya beli masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan Kota Binjai sebesar 11,063 juta rupiah per tahun.

3.2 Posisi Kota Binjai

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Utara, Kota Binjai berada pada posisi ke tiga dari 33 kabupaten/kota. Di provinsi Sumatera Utara, IPM tertinggi yaitu Kota Medan, status pembangunan manusia kabupaten/kota tersebut telah masuk pada kategori “sangat tinggi”. Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kota Sibolga, Kota Pematang Siantar, Kota Tebing Tinggi, Kota Binjai dan Kota Padang Sidempuan telah masuk pada kategori “tinggi”. Kabupaten Nias, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Tanjung Balai, dan Kota Gunung Sitoli berada pada posisi “sedang”. Pada tahun 2021 ini, ada kabupaten/kota yang mengalami kenaikan level IPM yaitu Kabupaten Padang Lawas Utara dari level “sedang” ke “tinggi”.

Gambar 3.1 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, 2021



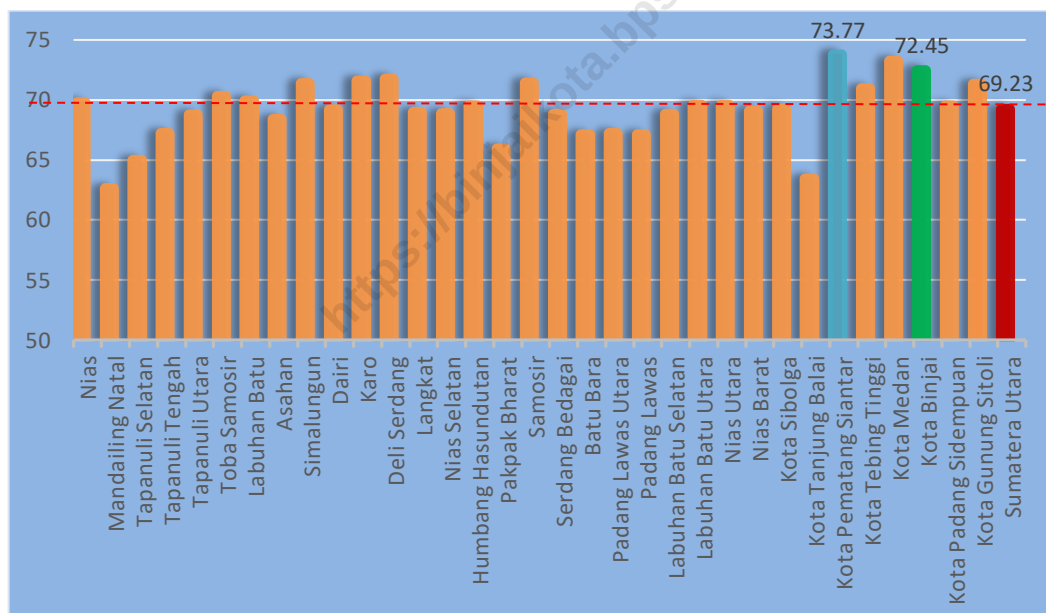
IPM tertinggi Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 adalah Kota Medan sebesar 81,21 persen. Hal ini disebabkan Medan merupakan ibukota Provinsi Sumatera Utara, dimana segala fasilitas pendidikan dan kesehatan terlengkap. Medan juga merupakan pusat perekonomian Provinsi Sumatera Utara dan Pulau Sumatera. Sedangkan, IPM terendah adalah Kabupaten Nias Barat sebesar 61,99 persen. Letak geografis yang jauh dari ibukota Provinsi dan merupakan Kabupaten yang baru mekar dari Kabupaten induknya yaitu Nias, sehingga fasilitas pendidikan, kesehatan dan perekonomian yang belum lengkap. Jika berdasarkan status, IPM Kota Binjai tahun 2021 berada pada golongan tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kota Binjai sudah menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

a. Angka Harapan Hidup

Sumber daya manusia secara keseluruhan dapat dipandang dari aspek fisik dan non fisik yang tentunya keduanya saling berkaitan. Kualitas fisik penduduk dapat dilihat

dari derajat kesehatan penduduk. Salah satu indikator utama dalam mengukur derajat kesehatan penduduk secara makro adalah angka harapan hidup waktu lahir. Angka harapan hidup ini memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara makro. Kebijakan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, diharapkan dapat meningkatkan angka harapan penduduk. Semakin tinggi angka harapan hidup menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat secara makro semakin tinggi.

Gambar 3.2 Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, 2021



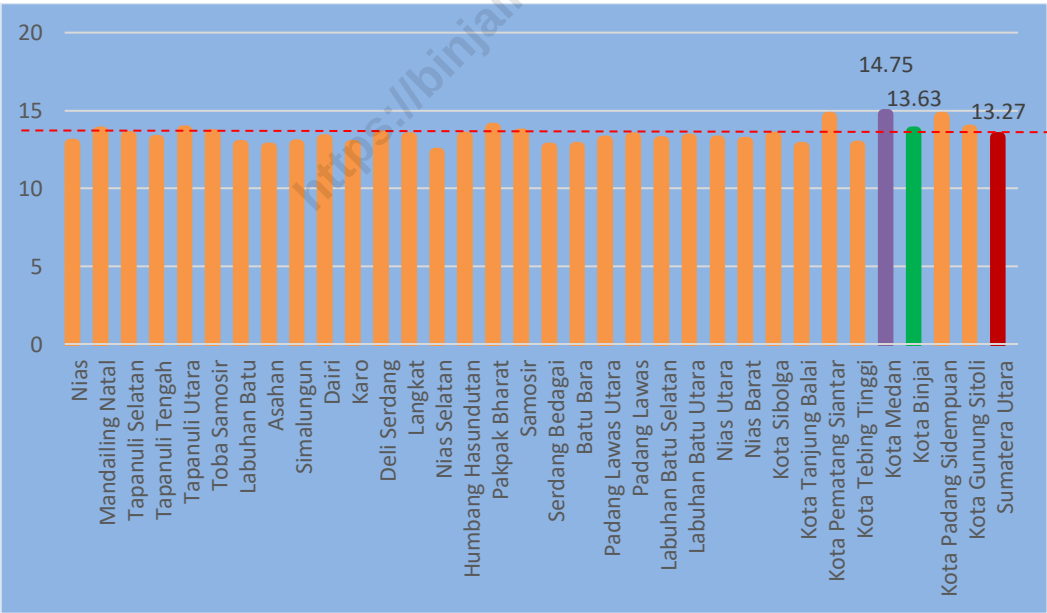
Angka harapan hidup tertinggi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 adalah Kota Pematang Siantar sebesar 73,77 tahun, sedangkan terendah adalah Kabupaten Mandailing Natal sebesar 62,65 tahun. Angka harapan hidup penduduk Kota Binjai tercatat 72,45 tahun yang berarti penduduk Kota Binjai yang baru lahir pada tahun 2021 mempunyai harapan yang besar untuk mencapai umur 72,45 tahun. Bila dibandingkan dengan kondisi Provinsi Sumatera Utara secara umum, penduduk

Sumatera Utara secara umum mempunyai peluang untuk hidup 3,22 tahun lebih pendek dari penduduk Kota Binjai. Angka harapan hidup Kota Binjai tahun 2021 menempati peringkat ke-3 (ketiga) di antara seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

b. Harapan dan Rata-rata Lama Sekolah

Salah satu indikator pendidikan yang digunakan untuk menghitung IPM adalah harapan lama sekolah yang menunjukkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Gambar 3.3 Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, 2021

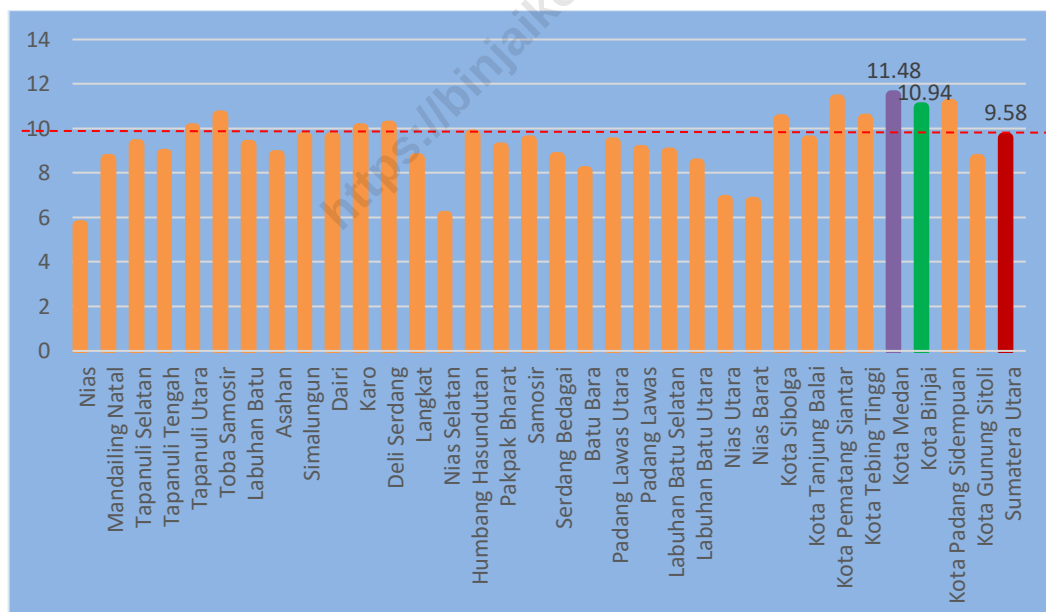


Dari gambar 3.3 memperlihatkan bahwa harapan lama sekolah tertinggi tahun 2021 di Provinsi Sumatera Utara adalah Kota Medan sebesar 14,75 tahun. Harapan lama sekolah terendah di Provinsi Sumatera Utara adalah Kabupaten Nias Selatan sebesar

12,27 tahun. Sedangkan, harapan lama sekolah Kota Binjai pada tahun 2021 sebesar 13,63 tahun, selisih 1,12 poin dengan Kota Medan dan lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka Provinsi Sumatera Utara yang secara umum sebesar 13,27 tahun. Kota Binjai menempati urutan ke-7 (ketujuh) bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Utara.

Indikator pendidikan selain harapan lama sekolah yang digunakan untuk menghitung indeks pembangunan manusia adalah rata-rata lama sekolah. Secara umum indikator ini menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk dewasa di suatu daerah yang menunjukkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

Gambar 3.4 Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, 2021



Pada tahun 2021, rata-rata lama sekolah penduduk dewasa di Kota Binjai sebesar 10,94 tahun, yang berarti secara umum penduduk di Kota Binjai sudah duduk di kelas sebelas SMA. Rata-rata lama sekolah penduduk 10 tahun terlama di Provinsi Sumatera

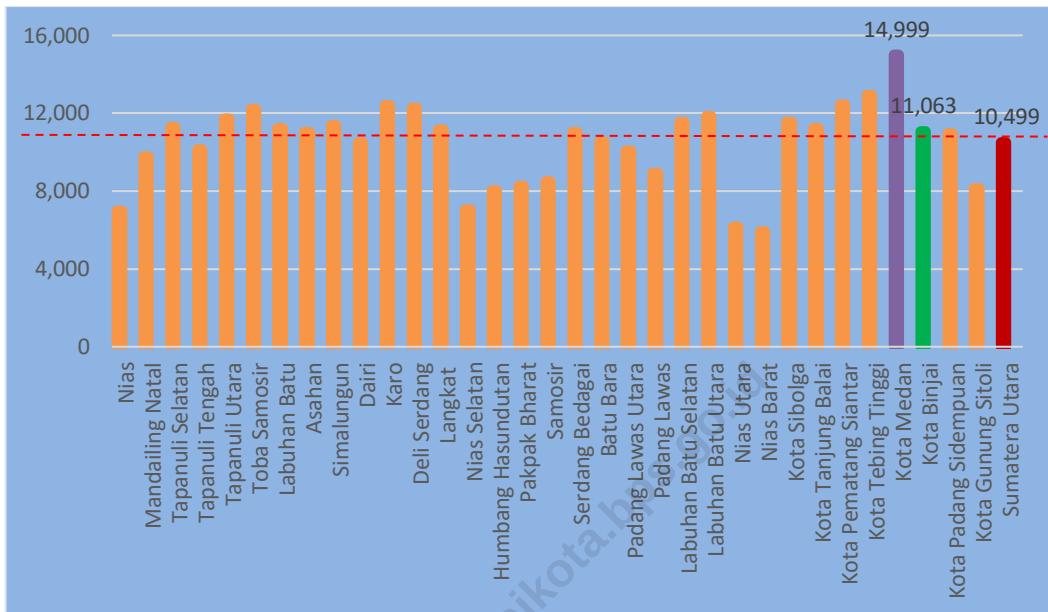
Utara adalah Kota Medan sebesar 11,48 tahun, sedangkan Kota Pematang Siantar menempati posisi kedua mencapai 11,29 tahun. Sedangkan, Kabupaten Nias menduduki peringkat terakhir dengan rata-rata lama sekolah sebesar 5,64 tahun. Angka rata-rata lama sekolah pada Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 sebesar 9,58 tahun dimana 1,36 tahun lebih cepat bila dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah Kota Binjai secara umum. Secara umum rata-rata lama sekolah penduduk Kota Binjai menduduki ranking ke-4 (ke empat) di antara kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Utara.

c. Pengeluaran per Kapita

Indeks daya beli digunakan untuk mengukur standar hidup layak. Indikator ini dipengaruhi pengetahuan yang dimiliki serta peluang yang ada untuk merealisasikan pengetahuan dalam berbagai barang/jasa sebagai pendapatan. Sehingga dengan pendapatan yang ada manusia dapat menciptakan daya beli untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Dalam penghitungan indeks daya beli digunakan pendekatan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi di daerah masing-masing. Penyesuaian ini diperlukan untuk menstandarkan tingkat harga di masing-masing daerah. Tingkat pengeluaran per kapita yang sama di suatu daerah belum tentu menunjukkan daya beli terhadap barang dan jasa yang sama karena tingkat harga di setiap daerah itu berbeda, oleh sebab itulah pengeluaran per kapita ini terlebih dahulu disesuaikan untuk dapat mengukur tingkat daya beli yang nyata.

Akibat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun pertengahan 1997 diyakini meningkatkan penduduk miskin dan tentunya menurunkan daya beli penduduk. Namun seiring dengan kondisi ekonomi yang mulai membaik yang ditandai dengan kembalinya pertumbuhan ekonomi ke arah positif, berdampak pada meningkatnya daya beli penduduk Kota Binjai.

Gambar 3.5 Pengeluaran per kapita (d disesuaikan) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, 2021 (ribu rupiah)



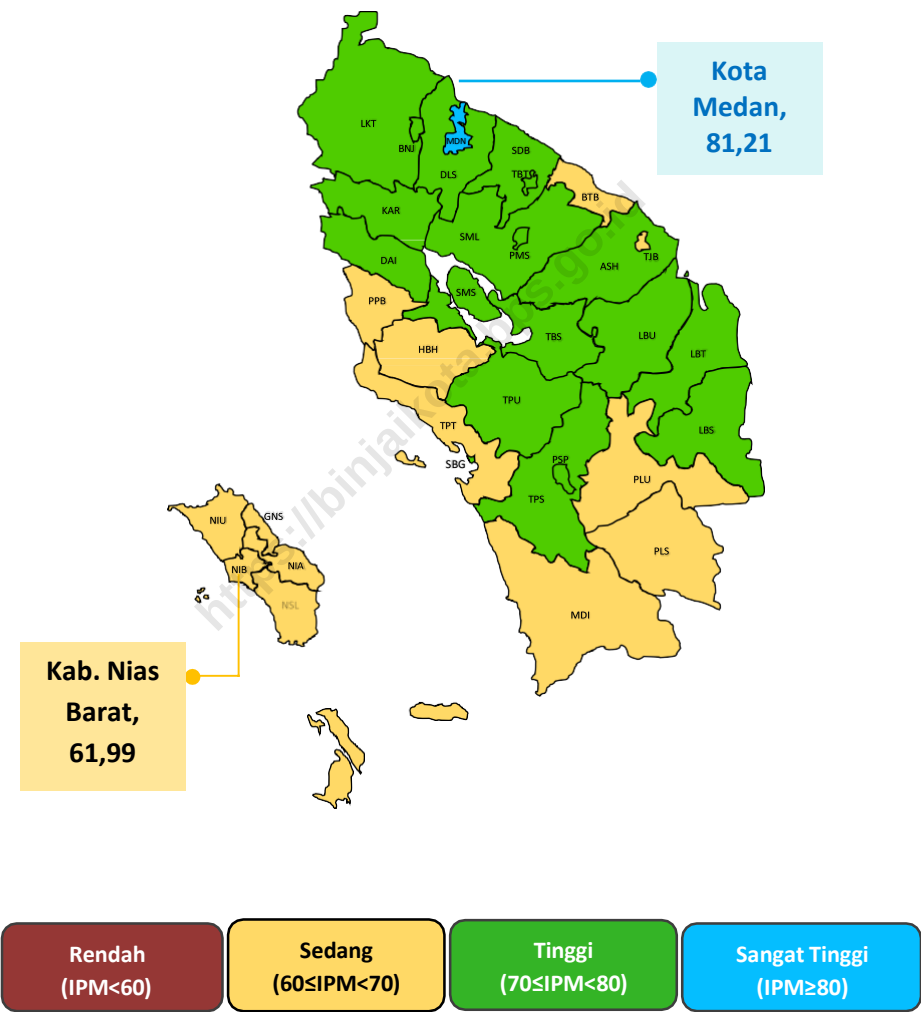
Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan tertinggi Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 adalah Kota Medan sebesar 14.999 ribu rupiah, dan terendah adalah Kabupaten Nias Barat sebesar 5.924 ribu rupiah. Sedangkan, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan Kota Binjai adalah 11.063 ribu rupiah pada tahun 2021. Untuk daya beli penduduk Kota Binjai pada tahun 2021 masih lebih tinggi dari penduduk Sumatera Utara pada umumnya yaitu sebesar 10.499 ribu rupiah. Dari gambar 3.5 dapat dilihat daya beli Kota Binjai menempati urutan ke-16 (ke enam belas) dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

3.3 Status Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota

Indeks Pembangunan Manusia di Kota Binjai pada tahun 2021 telah mencapai 76,01 dan sudah berstatus “tinggi”. Pada tingkat kabupaten/kota, capaian pembangunan manusia cukup bervariasi. Capaian pembangunan manusia tertinggi berada di Kota

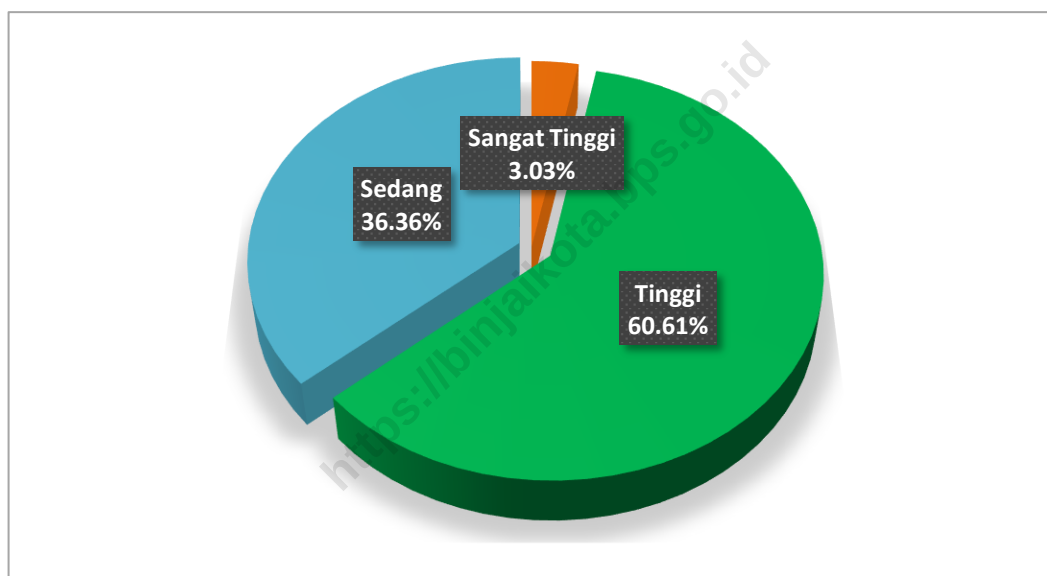
Medan dengan IPM sebesar 81,21. Sementara capaian pembangunan manusia terendah berada di Kabupaten Nias Barat sebesar 61,99.

Gambar 3.6 Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2021



Sebagian besar yaitu 60,61 persen status pembangunan manusia kabupaten/kota di Sumatera Utara telah berstatus “tinggi”. Sebanyak 36,36 persen kabupaten/kota di Sumatera Utara telah berhasil mencapai status pembangunan manusia “sedang”. Ada kabupaten/kota yang mencapai kategori pembangunan manusia sangat tinggi sebesar 3,03 persen. Pada tahun 2021, tidak ada lagi kabupaten/kota yang masuk dalam kategori pembangunan manusia “rendah”.

Gambar 3.7 Persentase Status Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2021



Dua puluh kabupaten/kota telah berhasil mencapai status pembangunan manusia “tinggi”. Kabupaten/kota tersebut adalah Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Labuhan Batu, Asahan, Simalungun, Dairi, Karo, Deli Serdang, Langkat, Samosir, Serdang Bedagai, Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Sibolga, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Binjai dan Padang Sidempuan. Sementara itu, 12 kabupaten/kota masuk pada kategori pembangunan manusia “sedang” adalah Nias, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Batu Bara, Padang Lawas, Nias Utara, Nias Barat, Tanjung Balai, dan Gunung Sitoli.

BAB IV

KEMAJUAN PEMBANGUNAN MANUSIA



Kota Medan



81,21

Kota
Pematang Siantar



79,17

Kota Binjai



76,01

Kabupaten
Deli Serdang



75,53

Kota
Padangsidempuan

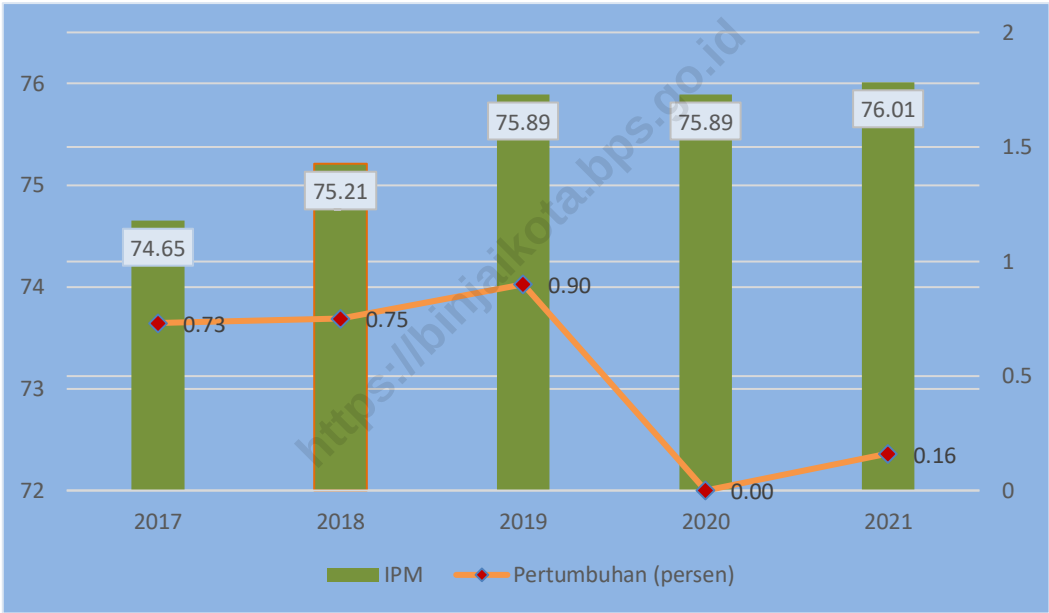


75,48

4.1 Tren Terbaru dalam Pembangunan Manusia: Melalui Lensa IPM

Pembangunan manusia telah memberikan pemahaman baru terhadap sudut pandang pembangunan yang lebih luas. Perkembangan pembangunan manusia secara umum menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. IPM Kota Binjai tahun 2017 sebesar 74,65 persen terus meningkat menjadi 76,01 persen pada tahun 2021. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa IPM Kota Binjai terus tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,5 persen per tahun.

Gambar 4.1 Perkembangan IPM Kota Binjai, 2017-2021



Peningkatan pembangunan manusia terus terjadi setiap tahun. Seluruh kabupaten/kota menunjukkan kenaikan IPM selama periode 2017 hingga 2021, kecuali Kota Binjai yang dimana tidak terdapat kenaikan pada periode 2019 hingga 2020. Beberapa wilayah mencatat perkembangan yang signifikan. Setidaknya, lima kabupaten/kota mencatat perkembangan paling cepat selama 2017 hingga 2021. Kabupaten/Kota dengan pembangunan manusia tercepat yaitu Kabupaten Nias Selatan,

Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Tabel 4.1 Kabupaten/Kota dengan Perkembangan Tercepat dalam Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara, 2017-2021

Rank	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan
1	Nias Selatan	1,06
2	Nias Barat	0,98
3	Nias	0,98
4	Nias Utara	0,85
5	Humbang Hasundutan	0,84

Apabila ditelusuri lebih jauh, wilayah yang mencatat perkembangan tercepat sebagian besar merupakan wilayah dengan capaian IPM tidak begitu tinggi. Bahkan, beberapa wilayah merupakan daerah dengan IPM terendah. Capaian IPM rendah bukan menjadi hambatan untuk meningkatkan pembangunan manusia. Wilayah dengan capaian pembangunan manusia yang masih rendah memiliki peluang untuk tumbuh lebih cepat dibanding wilayah dengan capaian yang sudah tinggi.

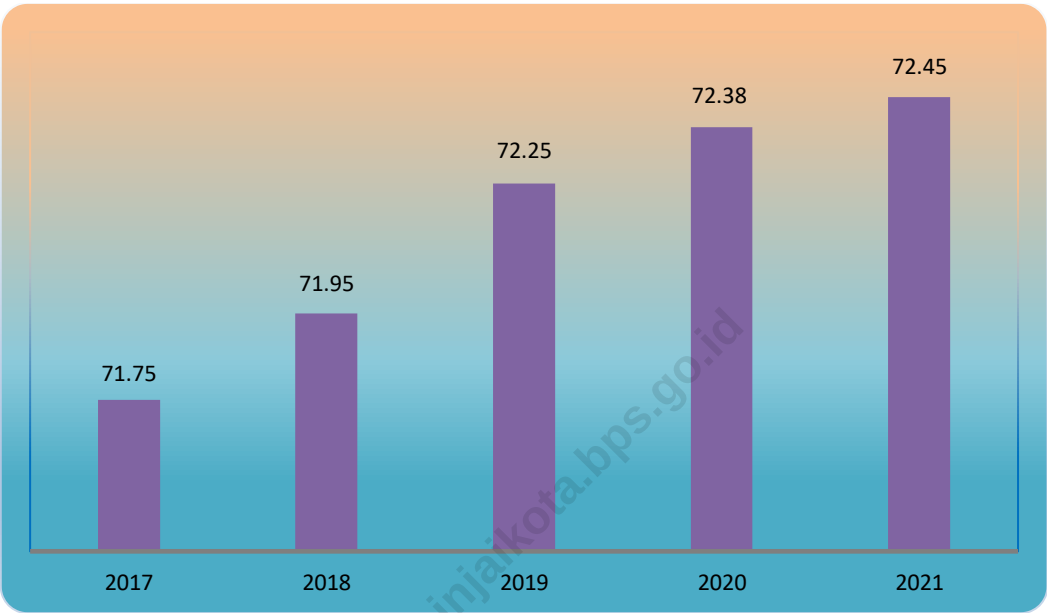
4.2 Hidup Lebih Lama, Kesehatan yang Lebih Baik

Hidup lebih lama merupakan dambaan setiap orang. Untuk dapat berumur panjang, salah satu faktornya diperlukan kesehatan yang lebih baik. Proksi umur panjang dan sehat yang digunakan dalam pembangunan manusia adalah indikator angka harapan hidup saat lahir (e_0). Indikator AHH menjadi salah satu indikator gambaran kesehatan masyarakat yang sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan di bidang kesehatan. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

AHH dapat menggambarkan tingkat kesehatan yang telah dicapai oleh masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesehatan masyarakat, diharapkan kesempatan untuk bertahan hidup akan semakin besar. Sebaliknya, tingkat kesehatan yang buruk akan cenderung memperpendek usia hidup. Angka harapan hidup berbanding terbalik

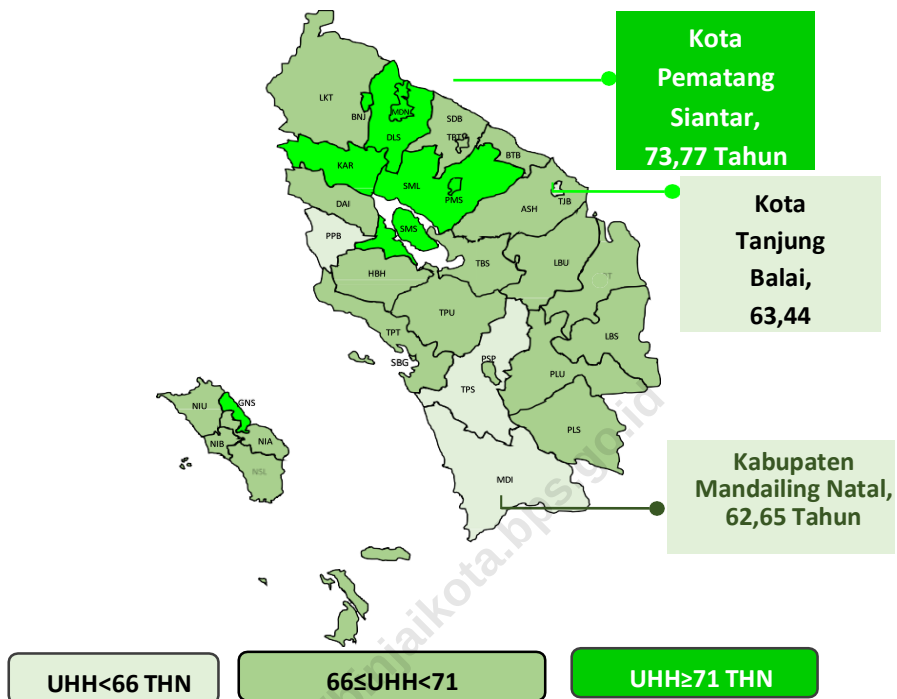
dengan tingkat kematian bayi, artinya semakin rendah angka kematian bayi maka angka harapan hidup akan semakin tinggi, demikian pula sebaliknya.

Gambar 4.2 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Binjai, 2017-2021



Gambar 4.2 memperlihatkan perkembangan AHH Kota Binjai selama kurun waktu lima tahun terakhir. Pada gambar tersebut terlihat bahwa AHH Kota Binjai selama periode 2017-2021 menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi. AHH Kota Binjai pada tahun 2021 mencapai 72,45 tahun. Berarti setiap bayi di Kota Binjai yang dilahirkan pada tahun 2021, dapat berharap untuk hidup sampai usia 72,45 tahun. Selama tahun 2017-2021, angka harapan hidup saat lahir di Kota Binjai tumbuh rata-rata 0,22 persen per tahun.

Gambar 4.3 Angka Harapan Hidup Saat Lahir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2021



Variasi angka harapan hidup berkisar dari 62,65 tahun hingga 73,77 tahun. Angka harapan hidup tertinggi berada di Kota Pematang Siantar. Sementara angka harapan hidup terendah berada di Kabupaten Mandailing Natal. Jika dilihat pertumbuhan selama empat tahun terakhir, Kota Tanjung Balai menjadi kota dengan pertumbuhan tercepat. Sementara itu, Kabupaten Labuhan Batu menjadi wilayah dengan pertumbuhan paling lambat.

4.3 Pendidikan Memperluas Peluang

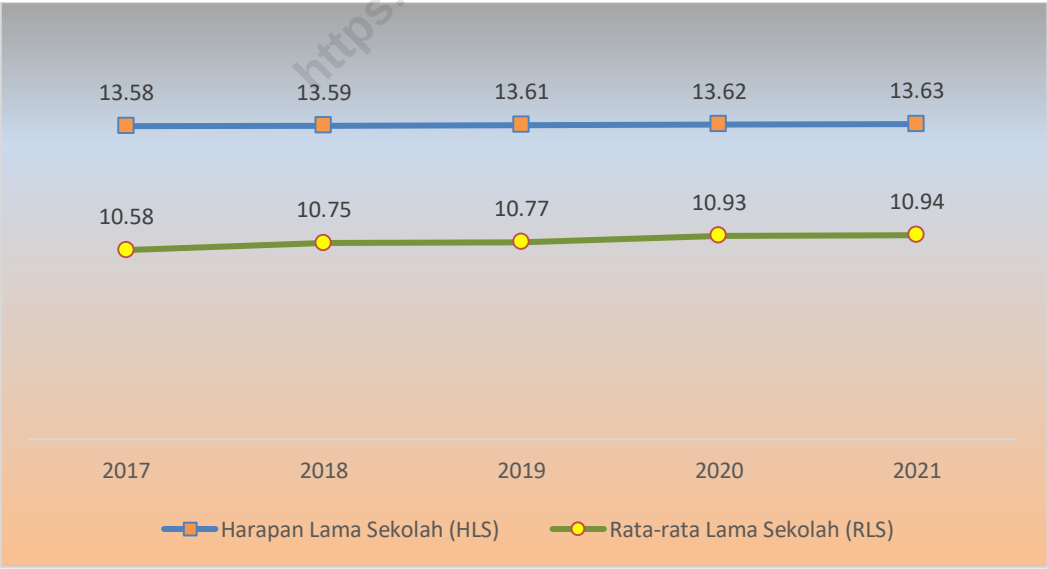
Pendidikan memperluas peluang seseorang, juga meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Sebagai nilai tambah, pendidikan juga akan memperluas pilihan-pilihan lain.

Manusia yang berpendidikan kecenderungan akan lebih memperhatikan tingkat kesehatan agar dapat hidup lebih lama. Tidak hanya itu, manusia yang berpendidikan secara umum juga akan berpeluang besar mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang

lebih layak. Pendidikan juga mempunyai korelasi yang kuat dengan berbagai aspek sosial ekonomi. Oleh karena itu, pendidikan menjadi penting sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas manusia agar dapat memperluas peluang mereka.

Berbagai penelitian menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan mempunyai hubungan yang kuat dengan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga maupun masyarakat. Pada dasarnya pembangunan pendidikan difokuskan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik muda maupun tua di setiap jenjang pendidikan utamanya hingga SLTA, serta untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dengan perkembangan dunia usaha. Peningkatan partisipasi masyarakat ini, bisa dilihat dari peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk, yang keberhasilannya memerlukan dukungan keluarga, masyarakat luas dan pemerintah.

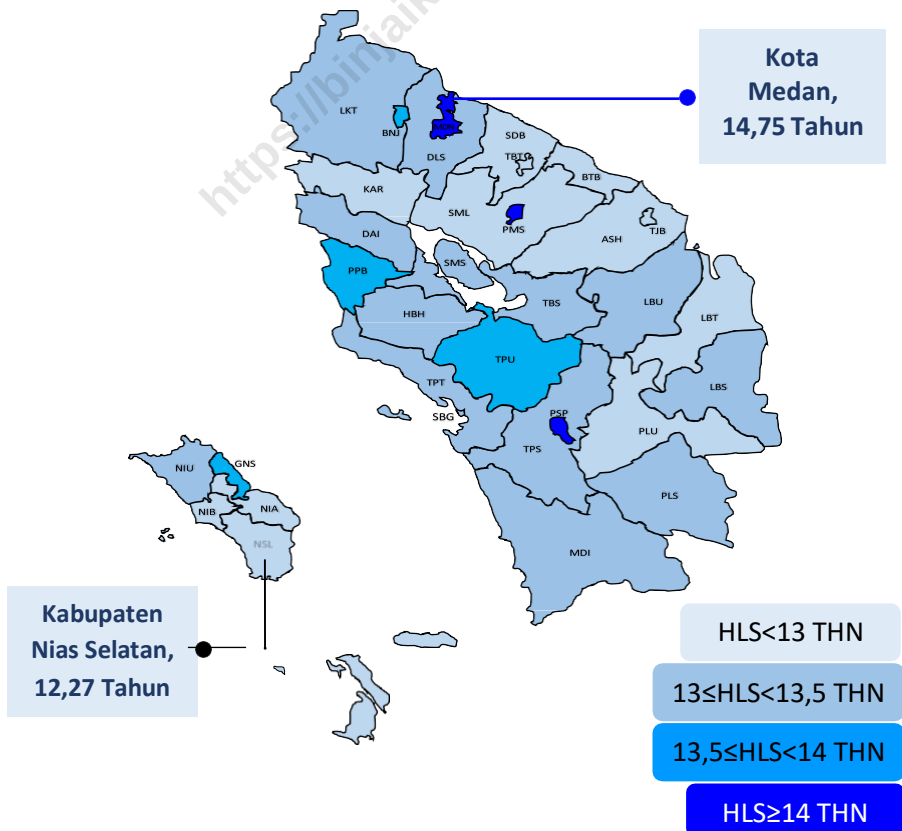
Gambar 4.4 Perkembangan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kota Binjai, 2017-2021



Sampai dengan tahun 2021, rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di Kota Binjai telah mencapai 10,94 tahun. Sementara anak usia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan akan dapat bersekolah selama 13,63 tahun. Perkembangan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kota Binjai selama lima tahun terakhir secara umum terus meningkat.

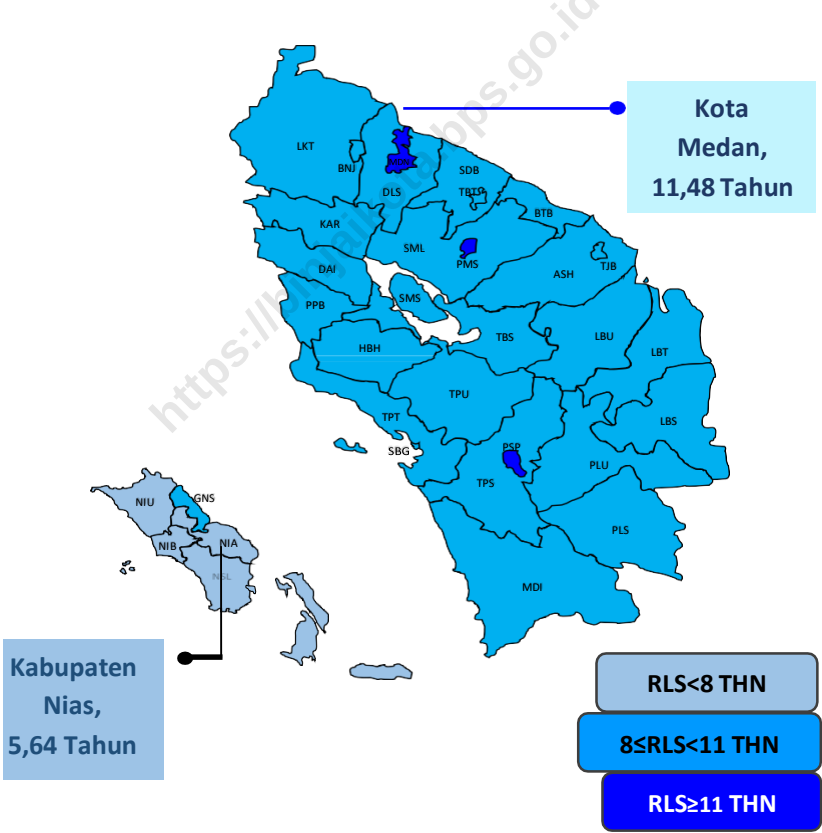
Pada tahun 2017, harapan lama sekolah di Kota Binjai sebesar 13,58 tahun secara konsisten terus meningkat menjadi 13,63 tahun pada tahun 2021. Demikian juga dengan rata-rata lama sekolah, pada tahun 2017 sebesar 10,58 tahun meningkat hingga 10,94 tahun pada tahun 2021. Rata-rata pertumbuhan rata-rata lama sekolah tumbuh 1,26 persen per tahun lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan harapan lama sekolah yang sebesar 0,09 persen per tahun.

Gambar 4.5 Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2021



Pada tahun 2021, harapan lama sekolah di Provinsi Sumatera Utara berkisar antara 12,27 tahun hingga 14,75 tahun. Harapan lama sekolah tertinggi berada di Kota Medan yaitu selama 14,75 tahun. Sementara harapan lama sekolah terendah di Kabupaten Nias Selatan yaitu hanya selama 12,27 tahun. Jika dilihat dari perkembangannya, selama kurun waktu 2017-2021 harapan lama sekolah tumbuh paling cepat di Kabupaten Mandailing Natal. Dalam kurun waktu yang sama, Kabupaten Samosir, Pakpak Bharat dan Binjai mengalami pertumbuhan harapan lama sekolah paling lambat di Sumatera Utara.

Gambar 4.6 Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2021



Rata-rata lama sekolah di Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 berkisar antara 5,64 tahun hingga 11,48 tahun. Rata-rata lama sekolah tertinggi berada di Kota Medan yaitu 11,48 tahun. Sementara terendah di Kabupaten Nias yaitu penduduk umur 25

tahun ke atas dengan rata-rata lama sekolah hanya selama 5,64 tahun. Jika dilihat dari perkembangannya, selama kurun waktu 2017-2021 rata-rata lama sekolah tumbuh paling cepat di Kabupaten Nias Selatan. Walaupun rata-rata lama sekolah Nias Selatan paling rendah kedua setelah Kabupaten Nias, tetapi pertumbuhannya paling cepat. Dalam kurun waktu yang sama, Kabupaten Labuhan Batu Utara merupakan kabupaten/kota pertumbuhan rata-rata lama sekolah paling lambat di Sumatera Utara.

4.4 Kenaikan Standar Hidup

Pengeluaran atau pendapatan telah memberikan sedikit gambaran mengenai ukuran pembangunan, seperti yang telah terjadi pada era tahun 70-an. Akan tetapi uang memiliki arti yang penting untuk memperluas pilihan, terutama bagi penduduk miskin. Oleh karena itu, perkembangan tingkat pengeluaran menjadi hal menarik untuk diteliti.

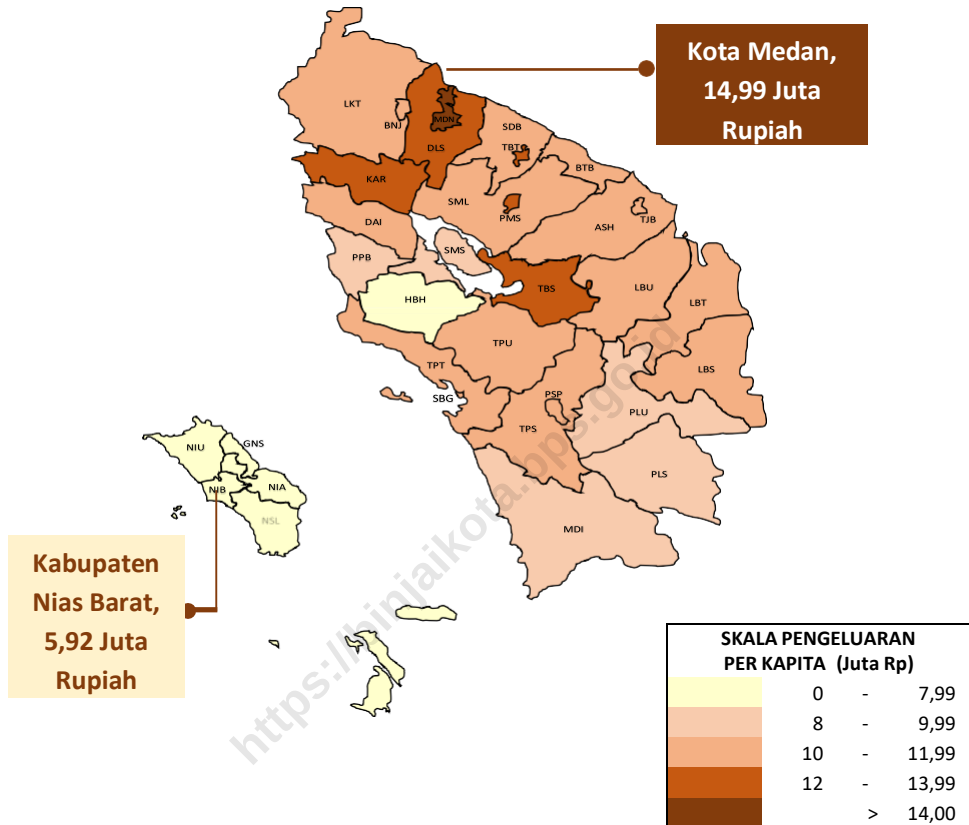
Daya beli masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Kemampuan ini berbeda antar wilayah, karena nilai tukar antar wilayah juga berbeda bergantung kepada harga riil pada masing-masing wilayah. Agar kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah menjadi terbanding, perlu dibuat standarisasi. Misalnya, satu rupiah di suatu wilayah Kabupaten memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Medan. Dengan adanya standarisasi ini, maka perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat dibandingkan.

Gambar 4.7 Perkembangan Pengeluaran per Kapita per Tahun Kota Binjai, 2017-2021 (juta rupiah)



Tahun 2021, pengeluaran per kapita penduduk Kota Binjai telah mencapai 11,06 juta per tahun. Pada Tahun 2017 tingkat daya beli masyarakat Kota Binjai sebesar 10,49 juta rupiah per kapita per tahun, meningkat menjadi 11,06 juta rupiah per kapita per tahun pada tahun 2021. Kemampuan daya beli masyarakat Kota Binjai selama periode 2016-2019 terus meningkat, namun mengalami penurunan pada tahun 2019-2020 dengan rata-rata pertumbuhan periode 2017-2021 sekitar 1,38 persen per tahun.

Gambar 4.8 Pengeluaran per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2021 (ribu rupiah)



Di tingkat kabupaten/kota di Povinsi Sumatera Utara, pengeluaran per kapita penduduk pada tahun 2021 berkisar antara 5,92 juta rupiah hingga 14,99 juta rupiah. Pengeluaran per kapita tertinggi berada di Kota Medan, sementara pengeluaran per kapita terendah berada di Kabupaten Nias Barat. Dalam kurun waktu 2017-2021, pengeluaran per kapita di seluruh kabupaten/kota juga terus meningkat. Gunung Sitoli merupakan kabupaten/kota dengan pertumbuhan pengeluaran per kapita tercepat di Sumatera Utara. Sementara Dairi merupakan kabupaten/kota dengan pertumbuhan pengeluaran per kapita paling lambat di Sumatera Utara.

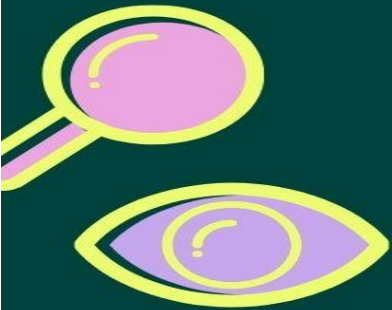
BAB V

DISPARITAS PEMBANGUNAN MANUSIA DI SUMATERA UTARA

KOTA

Kota Medan

IPM 81,21



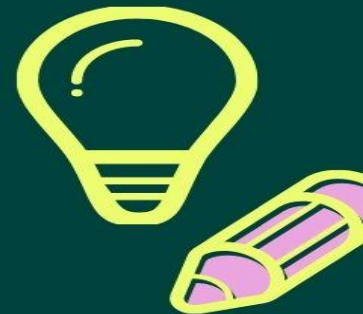
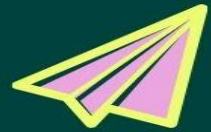
Kota Tanjung Balai
IPM 68,94



KABUPATEN

Kabupaten
Deli Serdang

IPM 75,53



Kabupaten Nias Barat
IPM 61,99



5.1 Gambaran Umum Wilayah Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara berada di bagian barat Indonesia, terletak pada garis 1⁰ - 4⁰ Lintang Utara dan 98⁰ - 100⁰ Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 memiliki 33 kabupaten/kota yang terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota. Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Provinsi Sumatera Utara dibagi dalam 3 (tiga) kelompok wilayah/kawasan yaitu Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Pantai Timur.

Tabel 5.1 Penggolongan Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara menurut Wilayah

Pantai Timur	Dataran Tinggi	Pantai Barat
Kab. Labuhan Batu	Kab. Tapanuli Utara	Kab. Nias
Kab. Asahan	Kab. Toba Samosir	Kab. Mandailing Natal
Kab. Deli Serdang	Kab. Simalungun	Kab. Tapanuli Selatan
Kab. Langkat	Kab. Dairi	Kab. Tapanuli Tengah
Kab. Serdang Bedagai	Kab. Karo	Kab. Nias Selatan
Kab. Batu Bara	Kab. Humbang Hasundutan	Kab. Padang Lawas Utara
Kab. Labuhan Batu Selatan	Kab. Pakpak Bharat	Kab. Padang Lawas
Kab. Labuhan Batu Utara	Kab. Samosir	Kab. Nias Utara
Kota Tanjung Balai	Kota Pematang Siantar	Kab. Nias Barat
Kota Tebing Tinggi		Kota Sibolga
Kota Medan		Kota Padang Sidimpuan
Kota Binjai		Kota Gunungsitoli

Sumber: Bappeda Sumatera Utara

Luas daratan Provinsi Sumatera Utara adalah 72.981,23 km², sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu, serta beberapa pulau kecil, baik di bagian barat maupun bagian timur pantai Pulau Sumatera. Berdasarkan luas daerah menurut kabupaten/kota di Provinsi Sumatera

Utara, luas daerah terbesar adalah Kabupaten Langkat dengan luas 6.262,00 km² atau 8,58 persen dari total luas Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan luas daerah terkecil adalah Kota Tebing Tinggi dengan luas 31,00 km² atau sekitar 0,04 persen dari total luas wilayah Provinsi Sumatera Utara.

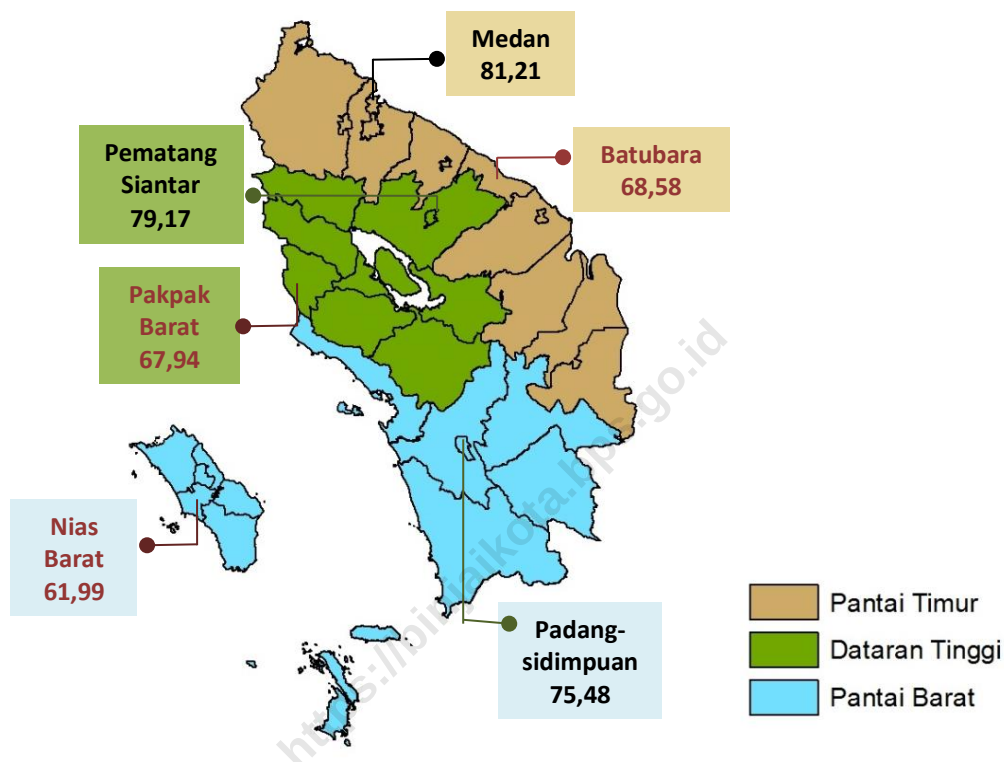
5.2 Kesenjangan Pembangunan Manusia Antara Kawasan Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Pantai Timur

Kesenjangan pencapaian pembangunan antar daerah bukan merupakan masalah baru bagi Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Utara. Kompleksitas berbagai faktor seperti sumber daya manusia, letak geografis, sejarah, dan ketidakmerataan sumber daya alam merupakan hal yang masih menjadi kendala dalam menuju konvergensi pembangunan. Oleh sebab itu, pemerataan pembangunan masih menjadi agenda pokok pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 2018-2023.

Kesenjangan pembangunan antar wilayah dalam jangka panjang bisa memberikan dampak pada kehidupan sosial masyarakat yang secara langsung juga mempengaruhi kualitas manusianya. Oleh sebab itu, perbandingan pencapaian pembangunan manusia antar wilayah menjadi sangat penting sebagai dasar evaluasi pemerintah dalam perumusan kebijakan yang selanjutnya digunakan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.

Berkaitan dengan pembangunan manusia, kesenjangan pembangunan manusia juga terjadi antara kawasan pantai timur, dataran tinggi dan pantai barat. Secara umum pembangunan manusia di kawasan pantai barat lebih tertinggal dibandingkan kawasan dataran tinggi dan pantai timur.

**Gambar 5.1 IPM Tertinggi dan Terendah menurut Kawasan
di Provinsi Sumatera Utara, 2021**



Tahun 2021, IPM kabupaten/kota tertinggi di kawasan Pantai Timur telah mencapai 81,21 (Medan) dan IPM terendah 68,58 (Batubara), sedikit berbeda dengan kawasan Dataran Tinggi IPM tertinggi mencapai 79,17 (Pematang Siantar) dan IPM terendah 67,94 (Pakpak Barat). Sementara di kawasan Pantai Barat, IPM kabupaten/kota tertinggi hanya 75,48 (Padang Sidimpuan) dan IPM terendah hanya 61,99 (Nias Barat). Perbedaan yang cukup signifikan ini menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan manusia di kawasan Pantai Barat lebih tinggi dibandingkan kawasan Dataran Tinggi dan Pantai Timur.

Capaian pembangunan manusia di kawasan Dataran Tinggi dan Pantai Timur lebih maju dibandingkan dengan capaian di kawasan Pantai Barat. Tahun 2021, sebanyak 77,78 persen kabupaten /kota di kawasan Dataran Tinggi dan 75,00 persen

kabupaten/kota di kawasan Pantai Timur telah berada pada status pembangunan manusia “tinggi”. Sementara di kawasan Pantai Barat hanya 33,33 persen kabupaten/kota yang telah berhasil mencapai status pembangunan manusia “tinggi”.

Tabel 5.2 Persentase Status IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara menurut Kawasan, 2021

Kawasan	Status Pembangunan Manusia			
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah
Pantai Timur	8,33	75,00	16,67	0
Dataran Tinggi	0	77,78	22,22	0
Pantai Barat	0	33,33	66,67	0

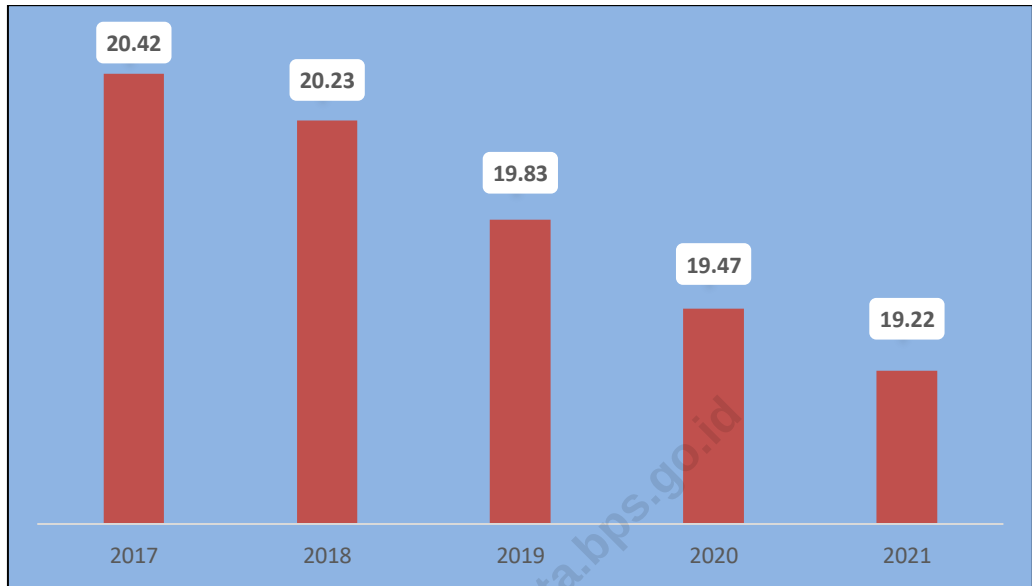
Persoalan pembangunan manusia yang masih “rendah” sudah tidak dijumpai lagi di provinsi Sumatera Utara baik di kawasan Pantai Timur, kawasan Dataran Tinggi maupun kawasan pantai Barat. Kabupaten yang berada di kawasan Pantai Barat yaitu Kabupaten Padang Lawas Utara pada 2020 masih berada pada status pembangunan manusia yang “sedang” pada tahun 2021 sudah berubah statusnya menjadi “tinggi”.

Upaya pemerataan terus diusahakan baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun standar hidup masyarakat. Upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Provinsi Sumatera Utara adalah hal yang perlu dilakukan sebagai titik awal menuju Provinsi Sumatera Utara yang lebih merata karena upaya pemerataan pembangunan tidak akan terwujud dalam jangka waktu singkat.

5.3 Kesenjangan Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara

Selama kurun waktu lima tahun, kesenjangan pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan. Selama tahun 2017-2021, terjadi penurunan kesenjangan antara angka IPM tertinggi dan terendah. Tahun 2017 selisih IPM kabupaten/kota tertinggi dengan terendah sebesar 20,42 turun menjadi 19,22 pada tahun 2021. Rentang IPM cenderung menyempit.

Gambar 5.2 Perkembangan Selisih IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Provinsi Sumatera Utara, 2017-2021

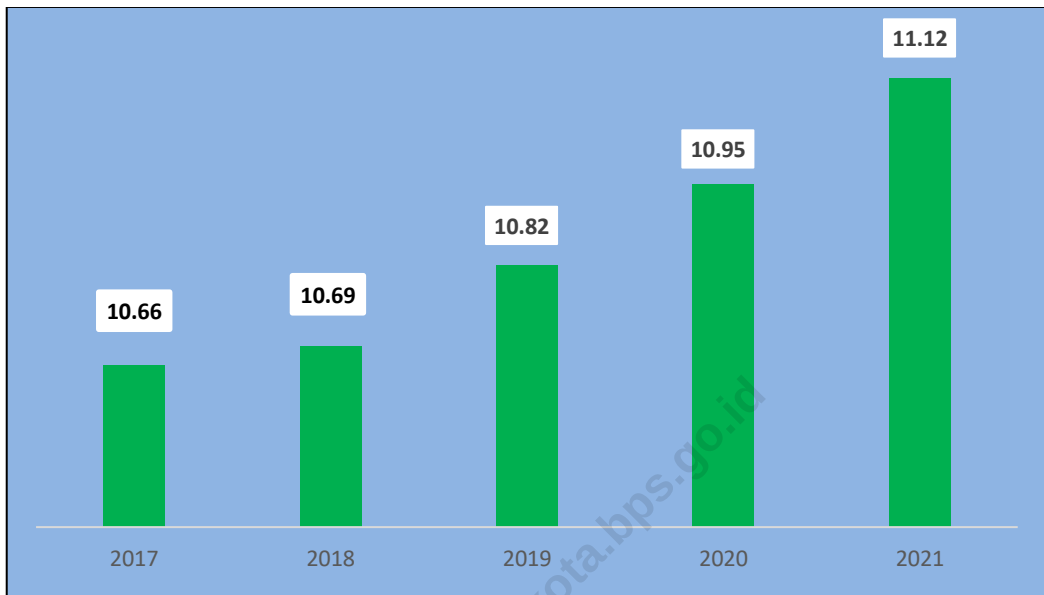


Penurunan kesenjangan IPM cukup menggembirakan, namun upaya pemerataan pembangunan masih perlu ditingkatkan. Kesenjangan pembangunan manusia di Sumatera Utara terjadi akibat perbedaan signifikan antara Kota Medan dengan Kabupaten Nias Barat. Pemerintah tentunya harus mempertimbangkan daerah yang menjadi prioritas agar kesenjangan juga semakin mengecil. Bagai sebuah paradoks, peningkatan yang signifikan di suatu wilayah, akan memperbesar jurang perbedaan jika tidak diimbangi oleh pembangunan wilayah lainnya.

a. Kesenjangan Kesehatan

Seiring dengan kesehatan masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang semakin membaik, seharusnya kesenjangan kesehatan antar kabupaten/kota pun semakin mengecil. Hal ini dapat dilihat dari jarak antara AHH tertinggi dengan AHH terendah. Tahun 2017 selisih AHH kabupaten/kota tertinggi dengan terendah sebesar 10,66 naik menjadi 11,12 pada tahun 2021. Rentang kesenjangan AHH cenderung melebar.

Gambar 5.3 Perkembangan Selisih AHH Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Provinsi Sumatera Utara, 2017-2021



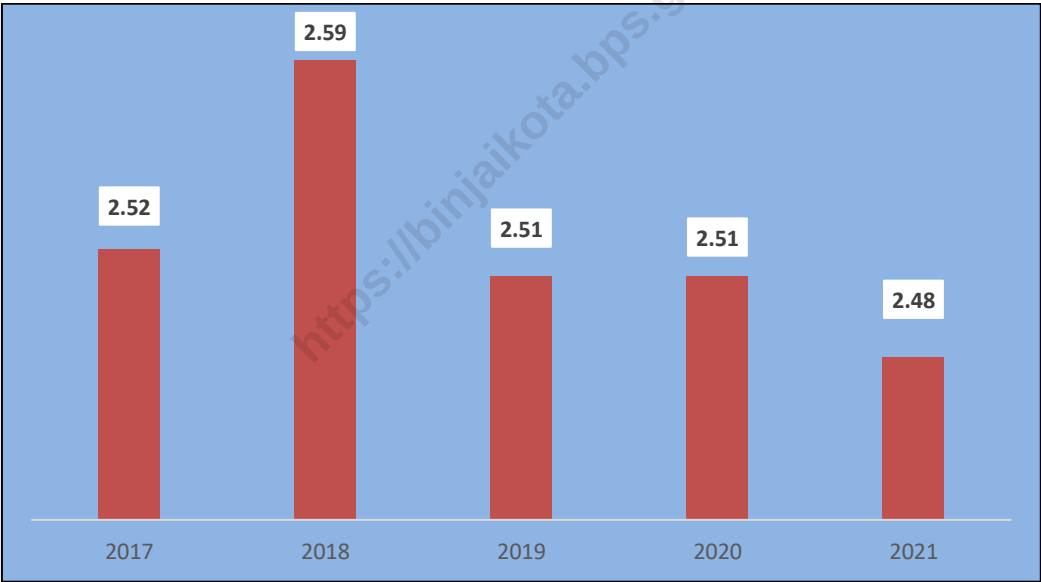
Kabupaten/kota dengan AHH terendah yaitu Kabupaten Mandailing Natal, sedangkan AHH tertinggi dicapai Kota Pematang Siantar. Penurunan kesenjangan AHH antar kabupaten/kota di Sumatera Utara cukup baik, namun kesenjangan sebesar 11,12 pada tahun 2021 tergolong masih tinggi. Dalam hal ini, upaya-upaya untuk pemerataan pembangunan kesehatan masyarakat harus terus digalakkan agar kesenjangan kesehatan semakin kecil.

b. Kesenjangan Pendidikan

Seiring dengan perbaikan kualitas kesehatan, dalam kurun waktu 2017-2021, pendidikan di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan perkembangan yang baik. Di semua kabupaten/kota, harapan lama sekolah penduduk 7 tahun semakin meningkat. Begitu pula dengan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Kesenjangan capaian pembangunan pendidikan yang ditunjukkan dengan rentang angka harapan lama sekolah tertinggi dan terendah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara cenderung menurun walaupun di tahun 2018 sedikit meningkat dibanding 2017. Tahun 2017 selisih HLS kabupaten/kota tertinggi dengan terendah sebesar 2,52 turun menjadi 2,48 pada tahun 2021. Selisih semakin meningkat sejak 2017 ke 2018, namun kesenjangan kemudian turun pada 2018 ke 2019, dan tetap pada 2019 ke 2020.

Gambar 5.4 Perkembangan Selisih HLS Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Provinsi Sumatera Utara, 2017-2021

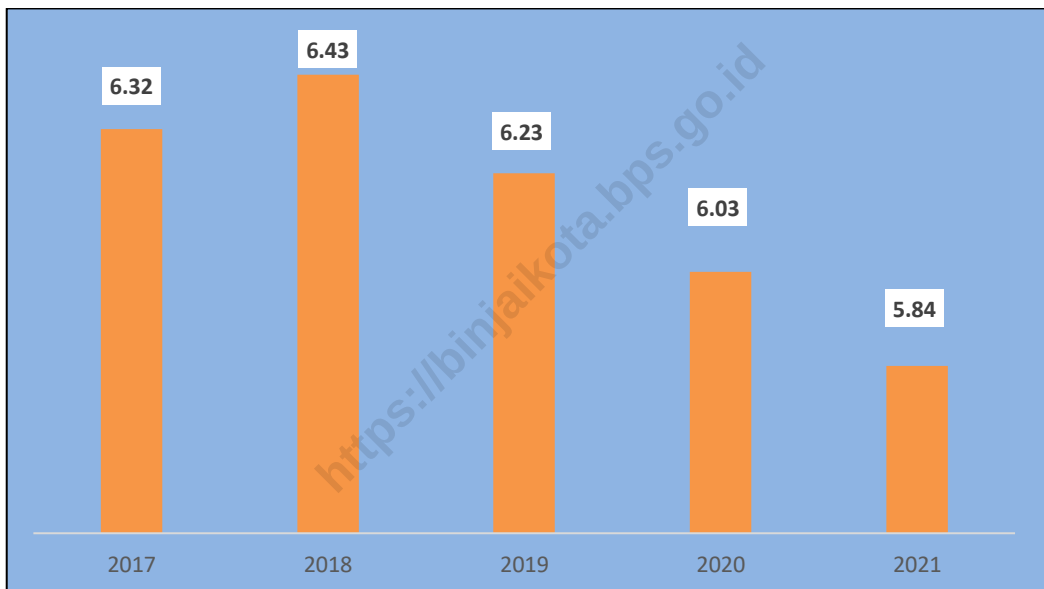


Kesenjangan angka harapan lama sekolah di Provinsi Sumatera Utara terjadi akibat perbedaan capaian antara Kota Medan dengan Kabupaten Nias Selatan. Pada tahun 2021, rata-rata penduduk usia 7 di Kota Medan berpotensi menempuh pendidikan selama 14,75 tahun. Di tahun yang sama, penduduk usia 7 tahun di Kab. Nias Selatan hanya berpotensi menempuh pendidikan selama 12,27 tahun. Upaya untuk

meningkatkan partisipasi masyarakat untuk sekolah semakin merata di Provinsi Sumatera Utara, namun tetap perlu ditingkatkan.

Tahun 2017 selisih RLS kabupaten/kota tertinggi dengan terendah sebesar 6,32 naik menjadi 6,43 pada tahun 2018. Kemudian menurun pada tahun 2019 yaitu sebesar 6,23 dan menurun kembali pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 6,03 dan 5,84.

Gambar 5.5 Perkembangan Selisih RLS Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Provinsi Sumatera Utara, 2017-2021

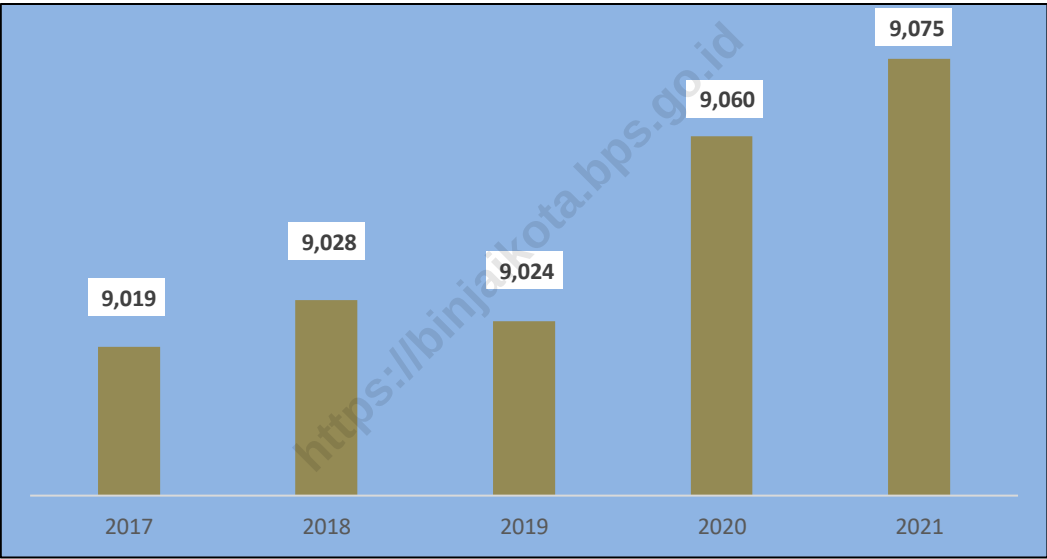


Kesenjangan rata-rata lama sekolah di Provinsi Sumatera Utara terjadi akibat perbedaan capaian antara Kota Medan dengan Kabupaten Nias. Di tahun 2021, rata-rata penduduk Kota Medan yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 11,48 tahun. Sementara penduduk usia 25 tahun ke atas di Nias hanya menempuh pendidikan selama 5,64 tahun. Oleh karena itu, pemerataan sarana dan akses pendidikan harus digalakkan agar kesenjangan semakin kecil.

c. Kesenjangan Pengeluaran per Kapita

Dimensi standar hidup yang layak menjadi salah satu kunci penting dalam membangun kualitas kehidupan manusia. Dimensi ini diproksi dengan indikator pengeluaran per kapita. Selama kurun waktu 2017 hingga 2021, angka pengeluaran per kapita Provinsi Sumatera Utara terus meningkat. Namun, hal itu masih menyisakan persoalan kesenjangan antar wilayah.

Gambar 5.6 Perkembangan Selisih Pengeluaran per Kapita Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Provinsi Sumatera Utara, 2017-2021 (ribu rupiah)



Berbeda dengan dimensi pendidikan dan kesehatan yang kesenjangan cenderung menurun, untuk pengeluaran per kapita kesenjangan cenderung meningkat. Tahun 2017 selisih pengeluaran per kapita kabupaten/kota tertinggi yaitu Kota Medan dengan terendah yaitu Kab. Nias Barat sebesar 9,01 juta. Namun pada tahun 2021 selisih pengeluaran per kapita naik menjadi 9,07 juta. Artinya, kesenjangan pengeluaran per kapita di Kota Medan dengan Kabupaten Nias Barat mencapai 9,07 juta rupiah. Rentang pengeluaran per kapita di Provinsi Sumatera Utara cenderung melebar.

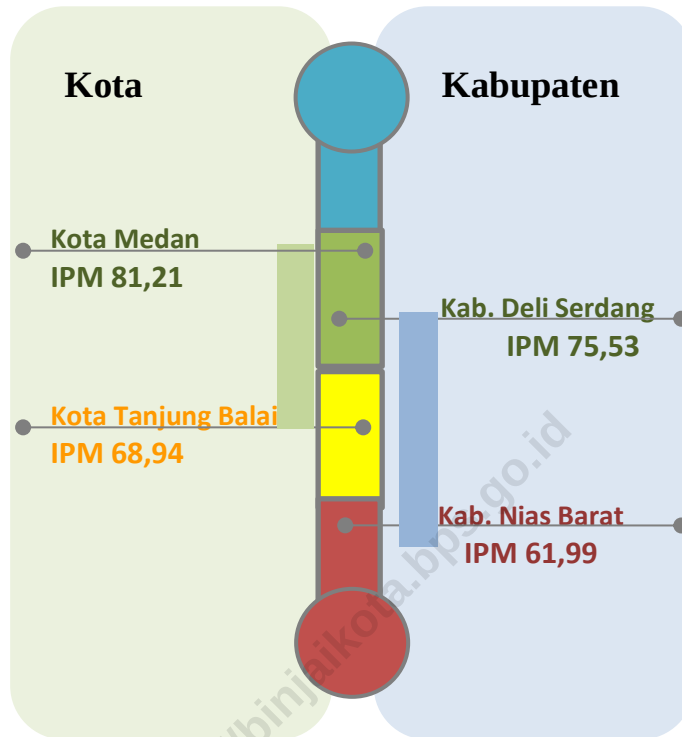
5.4 Kesenjangan Pembangunan Manusia Antara Kabupaten dan Kota

Hal yang lebih menarik jika membandingkan pencapaian pembangunan manusia antar kabupaten dan kota. Tidak dapat dipungkiri bahwa kota memiliki daya tarik tersendiri dibanding kabupaten. Kota menyediakan berbagai macam fasilitas yang memadai sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas dengan mudah. Kemudahan akses yang tersedia di kota cukup banyak, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, secara fisik umumnya kota jauh lebih maju dibanding kabupaten.

Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 33 kabupaten/kota yaitu 8 wilayah kota dan 25 wilayah kabupaten. Capaian pembangunan manusia di kota memang lebih tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten. Tahun 2021, capaian pembangunan manusia paling tinggi untuk wilayah kota adalah Kota Medan dengan capaian sebesar 81,21. Sementara itu, capaian pembangunan manusia paling tinggi untuk wilayah kabupaten adalah Kabupaten Deli Serdang sebesar 75,53.

Pada tahun yang sama, capaian pembangunan manusia untuk wilayah kota yang paling rendah yaitu Kota Tanjung Balai dengan IPM sebesar 68,94. Sementara itu untuk wilayah kabupaten, capaian IPM terendah yaitu Kabupaten Nias Barat dengan IPM hanya sebesar 61,99.

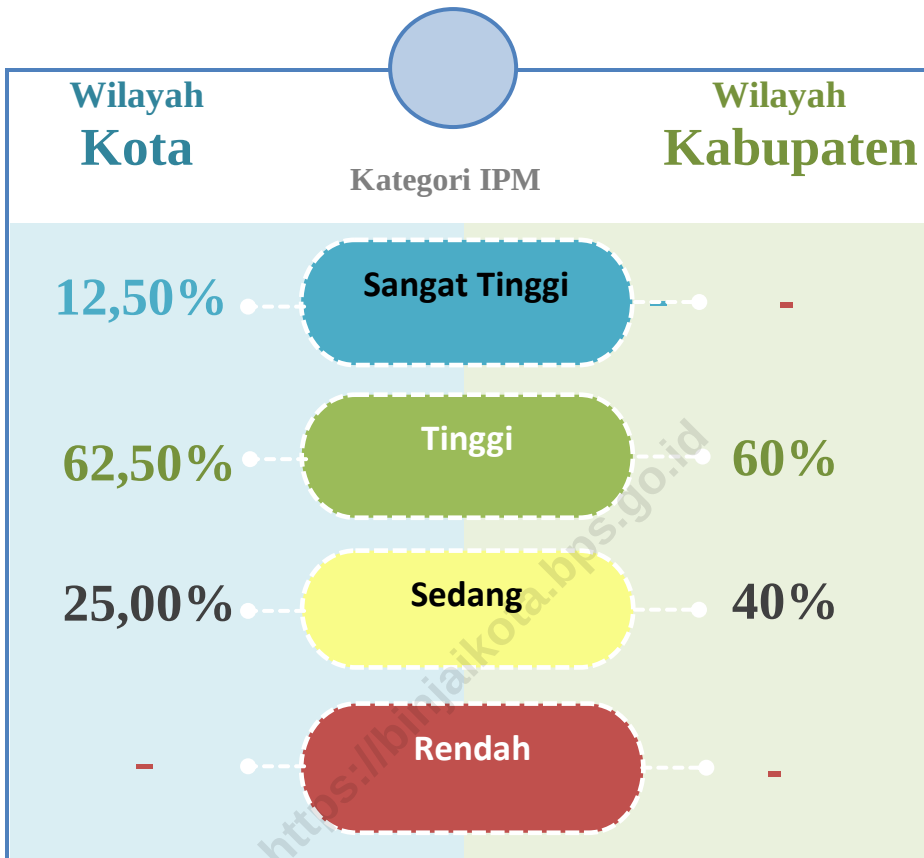
Gambar 5.7 IPM Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah, 2021



Kesenjangan pembangunan manusia antara kota dengan kabupaten cukup signifikan di Provinsi Sumatera Utara. Tahun 2021, IPM Kota Medan dengan Kota Tanjung Balai berjarak 12,27. Jika dengan kondisi di wilayah kabupaten, jarak IPM antara Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Nias Barat sebesar 13,54. Artinya, kesenjangan pembangunan manusia yang terjadi di kota lebih baik dibanding apa yang terjadi di wilayah kabupaten.

Dilihat dari status pembangunan manusia, perbedaan kemajuan antara kota dengan kabupaten di Provinsi Sumatera Utara begitu terlihat. Tahun 2021, dari delapan wilayah kota di Provinsi Sumatera Utara, yang berstatus pembangunan manusia “tinggi” telah mencapai 62,50 persen. Sementara di wilayah kabupaten, dari 25 Kabupaten hanya 14 kabupaten atau 56 persen yang berhasil mencapai status pembangunan manusia “tinggi”.

Gambar 5.8 Perbandingan IPM kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara menurut Status IPM, 2021



Di wilayah kabupaten, mayoritas status pembangunan manusia “tinggi”, yaitu sebanyak 60 persen dari total kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Sementara di wilayah Kota, hanya 25 persen kota yang masih status pembangunan sedang.

Selama kurun waktu 2017-2021, perkembangan tingkat kesenjangan yang terjadi di kota dan kabupaten mengalami dinamika. Kesenjangan pembangunan manusia yang terjadi di kota selama 2017 hingga 2021 cenderung turun. Jarak antara IPM tertinggi dan terendah di kota berada di angka 12,57 pada tahun 2017 dan 12,27 pada tahun 2021. Hal yang sama terjadi di kabupaten dengan kesenjangan pembangunan manusia yang juga cenderung naik. Tahun 2017, kesenjangan antara IPM tertinggi dan terendah di kabupaten berjarak 14,38 pada tahun 2021 jaraknya telah mengecil menjadi hanya 13,54.

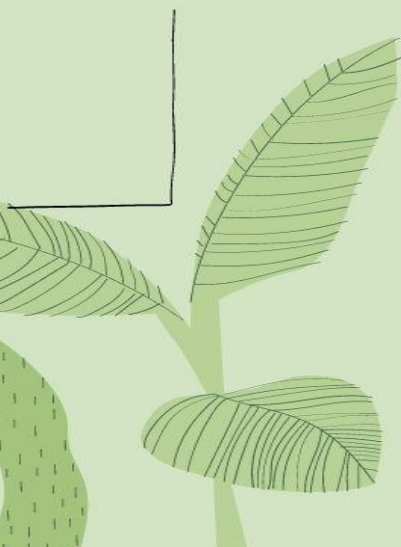
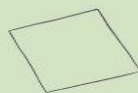
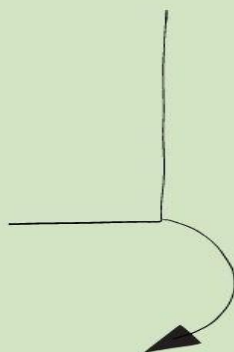
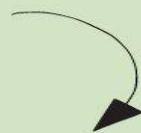
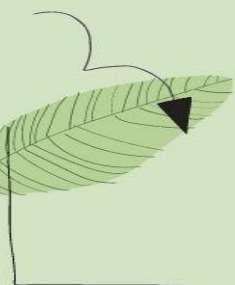
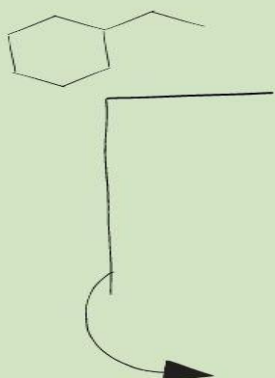
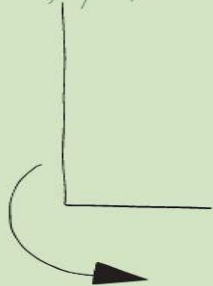
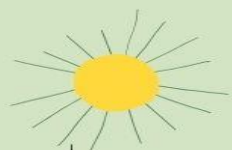
Fenomena kesenjangan di kota dan kabupaten juga terjadi pada semua dimensi pembangunan manusia, baik kesehatan, pendidikan, maupun standar hidup yang layak. Fenomena yang cukup menarik ternyata kesenjangan yang terjadi di kota lebih besar jika dibandingkan dengan kesenjangan yang terjadi di kabupaten. Hal ini terjadi pada semua dimensi, kecuali dimensi pendidikan.

Kesenjangan AHH yang terjadi di kota hampir sama dibandingkan kesenjangan AHH di kabupaten. Tahun 2021, jarak antara angka harapan hidup tertinggi dan terendah di kota sebesar 10,33 tahun. Sementara itu, perbedaan capaian angka harapan hidup tertinggi dan terendah di kabupaten 9,12 tahun. Perbaikan kesenjangan AHH di kabupaten cenderung lebih cepat dibanding dengan kota.

Dimensi berikutnya yang cukup penting adalah dimensi pendidikan yang terdiri dari dua indikator, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kesenjangan harapan lama sekolah yang terjadi di kota hampir sama dibandingkan kesenjangan HLS di kabupaten. Tahun 2021, jarak antara harapan lama sekolah tertinggi dan terendah di kota 2,13 tahun. Hanya sedikit berbeda, jarak antara harapan lama sekolah tertinggi dan terendah di kabupaten 1,6 tahun.

Kesenjangan rata-rata lama sekolah yang terjadi di kabupaten hampir dua kali lebih parah dibandingkan kesenjangan di kota. Tahun 2021 misalnya, perbedaan antara rata-rata lama sekolah tertinggi dan terendah di kota hanya 2,86 tahun. Sementara perbedaan di kabupaten mencapai 4,93 tahun. Tercatat bahwa selama tahun 2017 hingga 2021, kesenjangan rata-rata lama sekolah di kabupaten dan kota sama-sama berfluktuasi.

Kesenjangan pengeluaran per kapita yang terjadi di kota lebih tinggi dibandingkan dengan kesenjangan yang terjadi di kabupaten dengan angka yang hampir mendekati. Perkembangan kesenjangan keduanya selama empat tahun cenderung menurun meski demikian, dimensi ini masih perlu mendapat perhatian khusus agar kesenjangan pembangunan manusianya tidak semakin melebar.



L

A

M

P

I

R

A

N

<https://binjalina.bps.go.id>

**Lampiran 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Utara, 2021**

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nias	69,78	12,84	5,64	6.995	62,74
Mandailing Natal	62,65	13,61	8,63	9.771	67,19
Tapanuli Selatan	64,97	13,35	9,29	11.304	70,33
Tapanuli Tengah	67,24	13,07	8,84	10.138	69,61
Tapanuli Utara	68,76	13,70	9,99	11.710	73,76
Toba Samosir	70,29	13,46	10,57	12.224	75,39
Labuhan Batu	69,95	12,74	9,25	11.212	72,09
Asahan	68,37	12,61	8,80	11.030	70,49
Simalungun	71,37	12,79	9,61	11.376	73,40
Dairi	69,19	13,11	9,59	10.504	71,84
Karo	71,58	12,77	10,00	12.412	74,83
Deli Serdang	71,77	13,36	10,10	12.291	75,53
Langkat	68,97	13,24	8,66	11.142	71,35
Nias Selatan	68,86	12,27	6,06	7.041	62,35
Humbahas	69,51	13,29	9,71	8.016	69,41
Pakpak Barat	65,96	13,87	9,14	8.254	67,94
Samosir	71,41	13,48	9,44	8.504	70,83
Serdang Bedagai	68,82	12,61	8,69	11.017	70,56
Batu Bara	67,13	12,64	8,07	10.539	68,58
Paluta	67,22	13,04	9,38	10.055	70,11
Padang Lawas	67,13	13,27	9,02	8.921	68,64
Labusel	68,81	13,01	8,90	11.562	71,69
Labura	69,56	13,19	8,41	11.840	71,87
Nias Utara	69,55	13,04	6,77	6.155	62,82
Nias Barat	69,08	12,95	6,69	5.924	61,99
Kota Sibolga	69,25	13,28	10,41	11.540	73,94
Kota Tanjung Balai	63,44	12,62	9,45	11.225	68,94
Kota P. Siantar	73,77	14,57	11,29	12.436	79,17
Kota Tebing Tinggi	70,95	12,73	10,44	12.939	75,42
Kota Medan	73,23	14,75	11,48	14.999	81,21
Kota Binjai	72,45	13,63	10,94	11.063	76,01
Kota P. Sidempuan	69,50	14,56	11,09	10.965	75,48
Kota Gunung Sitoli	71,32	13,75	8,62	8.134	69,61
SUMATERA UTARA	69,23	13,27	9,58	10.499	72,00

**Lampiran 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Utara, 2020**

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nias	69,75	12,57	5,36	6.898	61,93
Mandailing Natal	62,60	13,32	8,62	9.684	66,79
Tapanuli Selatan	64,91	13,24	9,28	11.236	70,12
Tapanuli Tengah	67,15	13,06	8,62	10.071	69,23
Tapanuli Utara	68,63	13,69	9,85	11.648	73,47
Toba Samosir	70,08	13,45	10,52	12.154	75,16
Labuhan Batu	69,93	12,73	9,24	11.150	72,01
Asahan	68,26	12,60	8,79	10.890	70,29
Simalungun	71,22	12,78	9,60	11.308	73,25
Dairi	69,00	13,10	9,58	10.350	71,57
Karo	71,40	12,76	9,79	12.349	74,43
Deli Serdang	71,73	13,35	10,09	12.225	75,44
Langkat	68,80	13,05	8,65	11.071	71,00
Nias Selatan	68,74	12,23	5,85	6.974	61,89
Humbahas	69,27	13,28	9,54	7.850	68,87
Pakpak Barat	65,74	13,86	9,03	8.170	67,59
Samosir	71,27	13,47	9,43	8.422	70,63
Serdang Bedagai	68,68	12,60	8,54	10.950	70,24
Batu Bara	66,96	12,63	8,06	10.410	68,36
Paluta	67,17	12,87	9,37	9.987	69,85
Padang Lawas	67,09	13,03	9,01	8.807	68,25
Labusel	68,71	13,00	8,75	11.495	71,40
Labura	69,46	13,04	8,40	11.779	71,61
Nias Utara	69,43	13,03	6,58	6.064	62,36
Nias Barat	68,96	12,94	6,49	5.830	61,51
Kota Sibolga	69,01	13,16	10,40	11.473	73,63
Kota Tanjung Balai	63,27	12,50	9,44	11.132	68,65
Kota P. Siantar	73,55	14,45	11,16	12.372	78,75
Kota Tebing Tinggi	70,87	12,72	10,31	12.876	75,17
Kota Medan	73,14	14,74	11,39	14.890	80,98
Kota Binjai	72,38	13,62	10,93	10.997	75,89
Kota P. Sidempuan	69,41	14,54	11,00	10.856	75,22
Kota Gunung Sitoli	71,19	13,74	8,61	7.980	69,31
SUMATERA UTARA	69,10	13,23	9,54	10.420	71,77

Lampiran 3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2019

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nias	69,68	12,39	5,15	7.042	61,65
Mandailing Natal	62,51	13,17	8,36	9.900	66,52
Tapanuli Selatan	64,82	13,12	8,97	11.410	69,75
Tapanuli Tengah	67,08	12,79	8,48	10.175	68,86
Tapanuli Utara	68,46	13,68	9,71	11.791	73,33
Toba Samosir	69,93	13,28	10,36	12.375	74,92
Labuhan Batu	69,86	12,67	9,23	11.193	71,94
Asahan	68,11	12,59	8,49	10.983	69,92
Simalungun	71,07	12,77	9,36	11.422	72,98
Dairi	68,79	13,09	9,34	10.602	71,42
Karo	71,27	12,75	9,62	12.474	74,25
Deli Serdang	71,61	13,34	10,08	12.317	75,43
Langkat	68,59	12,81	8,64	11.208	70,76
Nias Selatan	68,58	12,22	5,53	7.105	61,59
Humbahas	69,06	13,27	9,53	7.902	68,83
Pakpak Barat	65,59	13,85	8,73	8.402	67,47
Samosir	71,16	13,46	9,15	8.654	70,55
Serdang Bedagai	68,46	12,59	8,53	11.061	70,21
Batu Bara	66,75	12,62	8,02	10.575	68,35
Paluta	67,06	12,47	9,10	10.194	69,29
Padang Lawas	66,98	13,02	8,69	9.100	68,16
Labusel	68,64	12,99	8,74	11.553	71,39
Labura	69,37	12,82	8,36	11.957	71,43
Nias Utara	69,29	12,78	6,25	6.245	61,98
Nias Barat	68,82	12,71	6,14	6.009	61,14
Kota Sibolga	68,77	13,15	10,18	11.656	73,41
Kota Tanjung Balai	63,02	12,49	9,26	11.383	68,51
Kota P. Siantar	73,33	14,21	11,15	12.571	78,57
Kota Tebing Tinggi	70,76	12,71	10,28	12.895	75,08
Kota Medan	72,98	14,73	11,38	15.033	80,97
Kota Binjai	72,25	13,61	10,77	11.260	75,89
Kota P. Sidempuan	69,15	14,53	10,70	11.181	75,06
Kota Gunung Sitoli	71,02	13,73	8,58	8.058	69,30
SUMATERA UTARA	68,95	13,15	9,45	10.649	71,74

**Lampiran 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Utara, 2018**

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita D disesuaikan (ribu rupiah)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nias	69,43	12,13	4,94	6.941	60,82
Mandailing Natal	62,24	13,15	8,11	9.653	65,83
Tapanuli Selatan	64,55	13,10	8,70	11.209	69,10
Tapanuli Tengah	66,82	12,66	8,29	10.067	68,27
Tapanuli Utara	68,11	13,66	9,65	11.607	72,91
Toba Samosir	69,59	13,26	10,34	12.095	74,48
Labuhan Batu	69,60	12,60	9,04	11.053	71,39
Asahan	67,79	12,56	8,47	10.735	69,49
Simalungun	70,75	12,75	9,18	11.311	72,49
Dairi	68,41	13,07	9,15	10.492	70,89
Karo	70,97	12,73	9,55	12.367	73,91
Deli Serdang	71,31	13,32	9,92	12.132	74,92
Langkat	68,22	12,75	8,52	11.088	70,27
Nias Selatan	68,24	12,20	5,20	6.941	60,75
Humbahas	68,69	13,25	9,28	7.630	67,96
Pakpak Barat	65,27	13,83	8,48	8.099	66,63
Samosir	70,87	13,44	9,14	8.348	69,99
Serdang Bedagai	68,08	12,57	8,51	10.737	69,69
Batu Bara	66,38	12,52	7,84	10.385	67,67
Paluta	66,77	12,42	9,06	9.912	68,77
Padang Lawas	66,69	13,00	8,67	8.772	67,59
Labusel	68,39	12,97	8,71	11.280	70,98
Labura	69,09	12,80	8,35	11.730	71,08
Nias Utara	68,98	12,58	6,09	6.041	61,08
Nias Barat	68,50	12,66	6,00	5.817	60,42
Kota Sibolga	68,36	13,13	9,91	11.405	72,65
Kota Tanjung Balai	62,60	12,47	9,24	11.102	68,00
Kota P. Siantar	72,93	14,02	11,08	12.290	77,88
Kota Tebing Tinggi	70,47	12,68	10,24	12.434	74,50
Kota Medan	72,64	14,72	11,37	14.845	80,65
Kota Binjai	71,95	13,59	10,75	10.750	75,21
Kota P. Sidempuan	68,73	14,51	10,63	10.795	74,38
Kota Gunung Sitoli	70,67	13,71	8,41	7.639	68,33
SUMATERA UTARA	68,61	13,14	9,34	10.391	71,18

Lampiran 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2017

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nias	69,18	12,12	4,93	6.629	60,21
Mandailing Natal	61,97	12,99	8,00	9.385	65,13
Tapanuli Selatan	64,28	13,08	8,67	10.955	68,69
Tapanuli Tengah	66,66	12,65	8,28	9.852	67,96
Tapanuli Utara	67,86	13,65	9,46	11.407	72,38
Toba Samosir	69,36	13,25	10,10	11.846	73,87
Labuhan Batu	69,44	12,59	9,01	10.760	71,00
Asahan	67,57	12,53	8,46	10.477	69,10
Simalungun	70,53	12,71	8,95	11.055	71,83
Dairi	68,13	13,06	8,90	10.395	70,36
Karo	70,77	12,71	9,54	12.059	73,53
Deli Serdang	71,11	12,90	9,70	11.891	73,94
Langkat	67,94	12,72	8,51	10.784	69,82
Nias Selatan	68,00	11,98	4,95	6.792	59,85
Humbahas	68,41	13,24	9,10	7.412	67,30
Pakpak Barat	65,05	13,82	8,47	7.913	66,25
Samosir	70,68	13,43	8,95	8.163	69,43
Serdang Bedagai	67,79	12,55	8,35	10.551	69,16
Batu Bara	66,10	12,49	7,83	10.084	67,20
Paluta	66,58	12,41	8,93	9.737	68,34
Padang Lawas	66,50	12,99	8,43	8.445	66,82
Labusel	68,14	12,95	8,70	10.892	70,48
Labura	68,91	12,79	8,34	11.510	70,79
Nias Utara	68,77	12,57	6,08	5.835	60,57
Nias Barat	68,28	12,61	5,78	5.594	59,56
Kota Sibolga	68,05	13,12	9,87	11.221	72,28
Kota Tanjung Balai	62,28	12,44	9,14	10.778	67,41
Kota P. Siantar	72,63	14,01	11,06	12.106	77,54
Kota Tebing Tinggi	70,28	12,66	10,09	12.055	73,90
Kota Medan	72,40	14,45	11,25	14.613	79,98
Kota Binjai	71,75	13,58	10,58	10.487	74,65
Kota P. Sidempuan	68,41	14,50	10,56	10.464	73,81
Kota Gunung Sitoli	70,42	13,69	8,40	7.300	67,68
SUMATERA UTARA	68,37	13,10	9,25	10.036	70,57

**Lampiran 6. Tren Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Utara, 2017-2021**

Kabupaten/Kota	IPM				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
Nias	60,21	60,82	61,65	61,93	62,74
Mandailing Natal	65,13	65,83	66,52	66,79	67,19
Tapanuli Selatan	68,69	69,10	69,75	70,12	70,33
Tapanuli Tengah	67,96	68,27	68,86	69,23	69,61
Tapanuli Utara	72,38	72,91	73,33	73,47	73,76
Toba Samosir	73,87	74,48	74,92	75,16	75,39
Labuhan Batu	71,00	71,39	71,94	72,01	72,09
Asahan	69,10	69,49	69,92	70,29	70,49
Simalungun	71,83	72,49	72,98	73,25	73,40
Dairi	70,36	70,89	71,42	71,57	71,84
Karo	73,53	73,91	74,25	74,43	74,83
Deli Serdang	73,94	74,92	75,43	75,44	75,53
Langkat	69,82	70,27	70,76	71,00	71,35
Nias Selatan	59,85	60,75	61,59	61,89	62,35
Humbahas	67,30	67,96	68,83	68,87	69,41
Pakpak Barat	66,25	66,63	67,47	67,59	67,94
Samosir	69,43	69,99	70,55	70,63	70,83
Serdang Bedagai	69,16	69,69	70,21	70,24	70,56
Batu Bara	67,20	67,67	68,35	68,36	68,58
Paluta	68,34	68,77	69,29	69,85	70,11
Padang Lawas	66,82	67,59	68,16	68,25	68,64
Labusel	70,48	70,98	71,39	71,40	71,69
Labura	70,79	71,08	71,43	71,61	71,87
Nias Utara	60,57	61,08	61,98	62,36	62,82
Nias Barat	59,56	60,42	61,14	61,51	61,99
Kota Sibolga	72,28	72,65	73,41	73,63	73,94
Kota Tanjung Balai	67,41	68,00	68,51	68,65	68,94
Kota P. Siantar	77,54	77,88	78,57	78,75	79,17
Kota Tebing Tinggi	73,90	74,50	75,08	75,17	75,42
Kota Medan	79,98	80,65	80,97	80,98	81,21
Kota Binjai	74,65	75,21	75,89	75,89	76,01
Kota P. Sidempuan	73,81	74,38	75,06	75,22	75,48
Kota Gunung Sitoli	67,68	68,33	69,30	69,31	69,61
SUMATERA UTARA	70,57	71,18	71,74	71,77	72,00

Lampiran 7. IPM, Peringkat dan Pertumbuhan IPM menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2021

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan (%)	IPM	Peringkat IPM	Status
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)
Nias	1,31	62,74	31	Sedang
Mandailing Natal	0,60	67,19	29	Sedang
Tapanuli Selatan	0,30	70,33	20	Tinggi
Tapanuli Tengah	0,55	69,61	22	Sedang
Tapanuli Utara	0,39	73,76	10	Tinggi
Toba Samosir	0,31	75,39	7	Tinggi
Labuhan Batu	0,11	72,09	12	Tinggi
Asahan	0,28	70,49	19	Tinggi
Simalungun	0,20	73,40	11	Tinggi
Dairi	0,38	71,84	14	Tinggi
Karo	0,54	74,83	8	Tinggi
Deli Serdang	0,12	75,53	4	Tinggi
Langkat	0,49	71,35	16	Tinggi
Nias Selatan	0,74	62,35	32	Sedang
Humbahas	0,78	69,41	24	Sedang
Pakpak Barat	0,52	67,94	28	Sedang
Samosir	0,28	70,83	17	Tinggi
Serdang Bedagai	0,46	70,56	18	Tinggi
Batu Bara	0,32	68,58	27	Sedang
Paluta	0,37	70,11	21	Tinggi
Padang Lawas	0,57	68,64	26	Sedang
Labusel	0,41	71,69	15	Tinggi
Labura	0,36	71,87	13	Tinggi
Nias Utara	0,74	62,82	30	Sedang
Nias Barat	0,78	61,99	33	Sedang
Kota Sibolga	0,42	73,94	9	Tinggi
Kota Tanjung Balai	0,42	68,94	25	Sedang
Kota P. Siantar	0,53	79,17	2	Tinggi
Kota Tebing Tinggi	0,33	75,42	6	Tinggi
Kota Medan	0,28	81,21	1	Sangat Tinggi
Kota Binjai	0,16	76,01	3	Tinggi
Kota P. Sidempuan	0,35	75,48	5	Tinggi
Kota Gunung Sitoli	0,43	69,61	22	Sedang
SUMATERA UTARA	0,32	72,00	15	



Sensus
Penduduk
2020

D A T A

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BINJAI

JL. WR. Mongonsidi No. 22 Binjai 20714

Telp. (061) 8826571, Fax. (061) 8821146

Homepage : <https://binjaikota.bps.go.id>, Email : bps1276@bps.go.id

ISBN 978-623-8830-18-2 (PDF)



9 786236 930182